



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR SEK-1.PW.01.02 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pencapaian target sasaran strategis, akuntabilitas, serta keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026, perlu disusun rencana aksi tingkat kementerian yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan;
- b. bahwa Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan instrumen pengendalian makro, memitigasi area kelemahan, serta mengakselerasi peningkatan kematangan akuntabilitas kinerja organisasi di seluruh lini lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6850);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
9. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
14. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.0.02-48 Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

KETIGA : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;

Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan

3. Menyediakan instrumen monitoring berkala guna memantau perkembangan, kemajuan dan/atau kendala yang dihadapi.

KEEMPAT : Seluruh Unit Utama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaporan pencapaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui tautan yang akan disampaikan kemudian;
2. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan; dan
3. Evaluasi capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan setiap Triwulan.

KEENAM : Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembinaan kinerja, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengambilan kebijakan manajerial di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2026

a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIS JENDERAL,



ASEP KURNIA

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Staf Ahli di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

LAMPIRAN
Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-1.PW.01.02
Tanggal : 25 Juni 2026

**MATRIKS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
Sekretariat Jenderal	1. Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	WTP	B03: Rekonsiliasi dan Pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN tingkat Unit Eselon I Tahun 2025 (<i>unaudited</i>)	B03: Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 (<i>Unaudited</i>)
					B06: Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 (<i>Audited</i>)	B06: Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 (<i>Audited</i>)
					B09: Kegiatan rekonsiliasi dan Pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester I Tahun 2026	B09: Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Semester I Tahun 2026
					B12: Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Triwulan III Tahun 2026	B12: Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Triwulan III Tahun 2026
			2. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92,00	B03: -	B03: -
					B06: Internalisasi Pengisian Target dan Realisasi Capaian Output sebagai salah satu Indikator IKPA	B06: Dokumen Pelaporan Data Target / Proyeksi dan Realisasi Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dan My Intrass
					B09: Internalisasi Capaian IKPA pada Sekretariat Jenderal	B09: Dokumen Hasil Internalisasi IKPA pada Sekretariat Jenderal
					B12: Internalisasi Capaian IKPA pada Sekretariat Jenderal	B12: Dokumen Hasil Internalisasi IKPA pada Sekretariat Jenderal
		2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	1. Nilai SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	78,00	B03: Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025	B03: Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025
					B06: Penilaian Mandiri atas SAKIP di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	B06: Dokumen laporan Penilaian Mandiri atas SAKIP di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						dan Pemasyarakatan
					B09: Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP KEMENIMIPAS oleh KEMENPAN & RB Tahun 2026	B09: Dokumen laporan Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP KEMENIMIPAS oleh KEMENPAN & RB Tahun 2026
					B12: Penyampaian Hasil Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP K/L/D Tahun 2026 oleh KEMENPAN & RB	B12: Dokumen laporan Penyampaian Hasil Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP K/L/D Tahun 2026 oleh KEMENPAN & RB
			2. Tingkat Maturitas SPIP	3,35	B03: 1. Telah dibangun lingkungan pengendalian; 2. Penyusunan rencana aksi berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; 3. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan; 4. Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.	B03: 1. SK Tim SPIP; 2. Laporan kegiatan sosialisasi SPIP; 3. Dokumen Manajemen Risiko dan Piagam Manajemen Risiko; 4. SK Unit Pengelola Risiko; 5. Dokumen rencana aksi atas hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; dan 6. Laporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
					B06: 1. Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi; 2. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasi; 3. Penyusunan rencana aksi berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; 4. Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.	B06: 1. Laporan Penilaian Mandiri (PM) maturitas SPIP terintegrasi yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas; 2. Dokumen rencana aksi atas hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; dan 3. Laporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
					B09: Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	B09: 1. Dokumen rencana aksi atas hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; dan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						2. Laporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
					B12: 1. Tindak lanjut atas rencana aksi berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; 2. Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	B12: 1. Dokumen rencana aksi atas hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP Tahun 2025 dan tindak lanjut tahun sebelumnya yang belum diselesaikan; 2. Laporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; 3. Dokumen Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko. a. undangan; b. daftar hadir; dan c. notula dan dokumentasi.
		3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Indeks Perencanaan Pembangunan	97,80	B03: -	B03: -
					B06: Melakukan sosialisasi regulasi terkini yang mengatur ketentuan mengenai Perencanaan dan Penganggaran pada Tahun 2026 kepada perwakilan pada unit kerja terkait.	B06: laporan kegiatan sosialisasi.
					B09: Melakukan sosialisasi regulasi terkini yang mengatur ketentuan mengenai Perencanaan dan Penganggaran pada Tahun 2026 kepada perwakilan pada unit kerja terkait	B09: Laporan kegiatan sosialisasi
					B12: Melakukan sosialisasi regulasi terkini yang mengatur ketentuan mengenai Perencanaan dan Penganggaran pada Tahun 2026 kepada perwakilan pada unit kerja terkait	B12: Laporan kegiatan sosialisasi
			2. Capaian RO Prioritas Nasional	98,37	B03: 1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, dengan mem-bahas strategi Penguatan Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan TA 2026; 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan	B03: 1. Dokumen rencana aksi Program Prioritas Nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan TA 2026; 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan TA 2026.

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Pemasyarakatan TA 2026.	
					B06: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan TA 2026.	B06: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan TA 2026.
					B09: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan TA 2026.	B09: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan TA 2026.
					B12: Melakukan Mo Rekonsiliasi dan Pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN tingkat Unit Eselon I Tahun 2025 (unaudited) nitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan TA 2026.	B12: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Prioritas Nasional pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan TA 2026
		4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Sekretariat Jenderal	80,00%	B03: 1. Melakukan permintaan penyusunan rencana aksi kepada masing-masing pengampu internal indikator penilaian RB General di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 2. Melakukan penyusunan regulasi yang mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, dengan melibatkan seluruh unit terkait; 3. Menerbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan unit/satuan kerja tentang pelaksanaan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi secara periodik setiap triwulan yang paling sedikit memuat: a. daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan tersebut; b. nama Bagian / Seksi /Subseksi/Subbagian/Pegawai yang akan melaksanakan; dan c. Tanggal Pelaksanaan.	B03: 1. Naskah Korespondensi; 2. Naskah Regulasi; 3. Surat Perintah; 4. Laporan Kegiatan.

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					4. Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh.	
					B06: 1. Menerbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan unit/satuan kerja tentang pelaksanaan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi secara periodik setiap triwulan yang paling sedikit memuat: a. daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan tersebut; b. nama Bagian / Seksi /Subseksi/Subbagian/Pegawai yang akan melaksanakan; dan c. tanggal Pelaksanaan. 2. Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh.	B06: 1. Surat Perintah; 2. Laporan Kegiatan.
					B09: 1. Menerbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan unit/satuan kerja tentang pelaksanaan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi secara periodik setiap triwulan yang paling sedikit memuat: a. daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan tersebut; b. nama Bagian / Seksi /Subseksi/Subbagian/Pegawai yang akan melaksanakan; dan c. Tanggal Pelaksanaan. 2. Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh.	B09: 1. Surat Perintah; 2. Laporan Kegiatan.
					B12: 1. Menerbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan unit/satuan kerja tentang pelaksanaan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi secara periodik setiap triwulan yang paling sedikit memuat: a. daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan tersebut;	B12: 1. Surat Perintah; 2. Laporan Kegiatan.

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					b. nama Bagian / Seksi /Subseksi/Subbagian/Pegawai yang akan melaksanakan; dan c. tanggal Pelaksanaan. 2. Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh.	
			2. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,10	B03: Melakukan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan.	B03: Laporan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Sekretariat Jenderal.
					B06: Melakukan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan.	B06: Laporan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Sekretariat Jenderal.
					B06: Melakukan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan.	B09: Laporan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Sekretariat Jenderal.
					B06: Melakukan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan.	B12: Laporan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Sekretariat Jenderal.
			3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1,05	B03: Menyusun pembaruan/perubahan regulasi yang mengatur ketentuan mengenai pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada Tahun 2026 agar sesuai dengan kebijakan terkini dan penyesuaian dengan kondisi aktual, dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait.	B03: Naskah Regulasi.
					B06: Melakukan koordinasi dengan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program zona integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	B06: Nota Dinas Penyampaian Hasil Koordinasi.
					B09: Melakukan koordinasi dengan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk	B09: Nota Dinas Penyampaian Hasil Koordinasi.

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
	2. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan	1. Indeks Merit Sistem	370	membahas hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program zona integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	
					B12: Melakukan koordinasi dengan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program zona integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	B12: Nota Dinas Penyampaian Hasil Koordinasi.
					B03: Menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan melalui SIASN BKN dan E-Formasi KemenpanRB.	B03: 1. Dokumen Profil Kebutuhan ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 2. Dokumen Usul Kebutuhan ASN T.A. 2026 di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 3. Dokumen Usul Kebutuhan Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia.
					B06: Melaksanakan sinkro-nisasi atau integrasi sistem manajemen kinerja internal dengan aplikasi E-Kinerja BKN.	B06: Laporan Kegiatan sinkronisasi atau integrasi sistem manajemen kinerja.
					B09: Melaksanakan pemetaan talenta ke dalam 9 (sembilan) box manajemen talenta .	B09: Dokumen Profil Talenta.
					B12: 1. Melaksanakan sinkro-nisasi atau integrasi sistem manajemen kinerja internal dengan aplikasi E-Kinerja BKN, 2. Melaksanakan pemeta-an talenta ke dalam 9 (sembilan) box manajemen talenta 3. Menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan melalui SIASN BKN dan E-Formasi KemenpanRB, 4. Melakukan pemetaan sinkronisasi data kepegawaian pada aplikasi STAR ASN dengan database BKN	B12: Laporan Kegiatan sinkronisasi atau integrasi sistem manajemen kinerja: 1. Dokumen Profil Talenta, 2. Dokumen hasil ABK dan Analisis Jabatan, 3. Dokumen Peta Jabatan, 4. Laporan kegiatan sin-kronisasi data kepegawaian pada star ASN dengan database BKN

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
			2. Indeks Profesionalitas ASN	65,00	B03: 1. Menyusun draf awal Peraturan Menteri tentang sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN dilakukan melalui pengaturan kerja berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi digital, penyesuaian proses bisnis yang sederhana dan adaptif, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk mendukung penyederhanaan birokrasi. 2. Melakukan pembahasan Naskah Prakebijakan Peraturan Menteri tentang sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Pustraka	B03: 1. Laporan kegiatan 2. Rancangan Peraturan Menteri mengenai Sistem Kerja Fleksibel
					B06: 1. Menyusun, mengusulkan dan melakukan pembahasan ORTA UPT Pemasarakatan, 2. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri tentang sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Biro Hukerma dan Unit Kerja Eselon 1	B06: Laporan kegiatan
					B09: Melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri tentang sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	B09: Laporan kegiatan
					B12: Menyusun dan melakukan penataan UPT Imigrasi (pembentukan UPT, pengubahan UPT dan pembubaran UPT)	B12: Dokumen kegiatan
		3. Indeks Ber Akhlak	3. Indeks Ber Akhlak	76,00	B03:	B03:
					B06: Menyusun Rancangan Desain Pengukuran Indeks Core Value BerAKHLAK bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemen-terian Imigrasi dan Pemasarakatan.	B06: Laporan Kegiatan
					B09: Melakukan Pembahas-an Rancangan Pengukuran Indeks Core Value BerAKHLAK bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemen-	B09: Laporan Kegiatan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					terian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
					B12: Melakukan Pendampingan Pengisian Survei Implementasi Core Value BerAKHLAK yang berbasis digital	B12: Laporan Kegiatan
		2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Efektifitas Organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.	1. Indeks Pelayanan Publik	3,00	B03 : B06: 1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja. 2. Melaksanakan verifikasi data dukung dan verifikasi lapangan terhadap UPT	B03 : B06: 1. Laporan kegiatan pelaksanaan PEKPPP 2. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 3. Laporan verifikasi data dukung 4. Berita acara verifikasi lapangan
					B09: 1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja. 2. Melaksanakan verifikasi data dukung dan verifikasi lapangan terhadap UPT 3. Melaksanakan evaluasi pelayanan publik pada beberapa pelaksana fungsi keimigrasian di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	B09: 1. Laporan kegiatan pelaksanaan PEKPPP 2. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 3. Laporan verifikasi data dukung 4. Berita acara verifikasi lapangan 5. Laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik pada beberapa pelaksana fungsi keimigrasian di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri 6. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
					B12: 1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja. 2. Melaksanakan verifikasi data dukung dan verifikasi lapangan terhadap UPT 3. Melaksanakan evaluasi pelayanan publik pada beberapa pelaksana fungsi keimigrasian di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	B12: 1. Laporan kegiatan pelaksanaan PEKPPP 2. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 3. Laporan verifikasi data dukung 4. Berita acara verifikasi lapangan 5. Laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik pada beberapa pelaksana fungsi

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						keimigrasian di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri 6. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
			2. Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	80,00	B03: B06: 1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai antara 78,00 – 100. 2. Melakukan pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia 3. Melaksanakan hasil pengawasan Ombudsman RI untuk kepatuhan regulasi dan meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi mutu pelayanan.	B03: B06: 1. Laporan kegiatan pemberian apresiasi dan penghargaan 2. Laporan kegiatan pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia 3. Laporan Kegiatan
					B09 : Melakukan pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia	B09: Laporan kegiatan pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia
					B12: 1. Melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai antara 0 – 77,99 bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2. Melakukan pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia	B12: 1. Laporan kegiatan pembinaan tertib maladministrasi 2. Laporan kegiatan pendampingan pelaksanaan penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia
			3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	86,05%	B03: Melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan B06: Melaksanakan penataan kelembagaan di	B03: Laporan hasil penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan B06: Laporan hasil penataan kelembagaan di

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
					B09: Melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	B09: Laporan hasil penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
					B12: Melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	B12: Laporan hasil penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
			4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4,11	B03: Melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN secara langsung pada unit kerja/satuan kerja sebagai dasar penyempurnaan kebijakan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan optimalisasi PNBK keimigrasian	B03: Laporan hasil analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN beserta rekomendasi penataan sistem kerja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
					B06: Melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN secara langsung pada unit kerja/satuan kerja sebagai dasar penyempurnaan kebijakan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan optimalisasi PNBK keimigrasian	B06: Laporan hasil analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN beserta rekomendasi penataan sistem kerja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
					B09: Melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN secara langsung pada unit kerja/satuan kerja sebagai dasar penyempurnaan kebijakan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan optimalisasi PNBK keimigrasian	B09: Laporan hasil analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN beserta rekomendasi penataan sistem kerja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
					B12: Melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN secara langsung pada unit kerja/satuan kerja sebagai dasar penyempurnaan kebijakan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan optimalisasi PNBK keimigrasian	B12: Laporan hasil analisis dan evaluasi penerapan sistem kerja ASN beserta rekomendasi penataan sistem kerja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
	3. Biro Barang Milik Negara	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	1. Nilai Kualitas Pengelolaan Aset	3,00	B03: 1. Melakukan pengawasan dan pengendalian	B03: 1. Laporan Wasdal Semester II dan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
		Barang Milik Negara serta Pengadaaan Barang dan Jasa			(wasdal) terhadap pengelolaan BMN dan menyampaikan laporan hasil wasdal secara tepat waktu - Melakukan pendataan realisasi PNPB dari Pemanfaatan - Melakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan - Menindaklanjuti persetujuan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan SK pelaksanaan sewa dan kontrak - Melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2027 - Mengusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat	Tahunan - Rekapitulasi Realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN - Laporan Barang Pengguna Semester II/Tahunan - Rekapitulasi SK penetapan pelaksanaan sewa, kontrak dan bukti setor - Dokumen hasil penelaahan RK BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2027 - Laporan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat dari Satuan Kerja (sesuai Tata Naskah Dinas)
					B06: - Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan menyampaikan hasil progres tindak lanjut tersebut - Melakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan - Mengusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat - Persetujuan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Rusak Berat - Penerbitan SK Penghapusan BMN	B06: - Surat jawaban/tanggapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK - Laporan Barang Pengguna Anaudited, Laporan Barang Pengguna Audited - Laporan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat dari Satuan Kerja (sesuai Tata Naskah Dinas) - Laporan hasil rekapitulasi persetujuan Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Rusak Berat (sesuai Tata Naskah Dinas) - SK Penghapusan BMN
					B09: - Melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap pengelolaan BMN dan menyampaikan laporan hasil wasdal secara tepat waktu - Melakukan pendataan realisasi PNPB dari Pemanfaatan - Melakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Imigrasi dan	B09: - Laporan Wasdal Semester I - Rekapitulasi Realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN - Laporan Barang Pengguna Semester I - Rekapitulasi SK penetapan pelaksanaan sewa, kontrak dan bukti setor - Laporan usulan pemindahtanganan,

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Pemasyarakatan 4. Menindaklanjuti persetujuan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan SK pelaksanaan sewa dan kontrak 5. Mengusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat	pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat dari Satuan Kerja (sesuai Tata Naskah Dinas)
					B12: 1. Mengusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat 2. Persetujuan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Rusak Berat 3. Penerbitan SK Penghapusan BMN	B12: 1. Laporan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN Rusak Berat dari Satuan Kerja (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Laporan hasil rekapitulasi persetujuan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN Rusak Berat (sesuai Tata Naskah Dinas) 3. SK Penghapusan BMN
			2. Nilai Tata Kelola Pengadaan	71,00	B03: Melakukan Pendampingan dan pemantauan pelaksanaan PBJ	B03: Laporan Monitoring dan Evaluasi pengadaan barang/jasa
					B06: 5. Melakukan Pendampingan dan pemantauan pelaksanaan PBJ 6. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan kompetensi pelaku pengadaan	B06: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi pengadaan barang/jasa 2. Laporan Pembinaan dan Pengembangan kompetensi pelaku pengadaan
					B09: Melakukan Pendampingan dan pemantauan pelaksanaan PBJ	B09: Laporan Monitoring dan Evaluasi pengadaan barang/jasa
					B12: 1. Melakukan Pendampingan dan pemantauan pelaksanaan PBJ 2. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan kompetensi pelaku pengadaan 3. Melakukan Pemenuhan Data Dukung untuk mempertahankan capaian Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif	B12: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi pengadaan barang/jasa 2. Laporan Pembinaan dan Pengembangan kompetensi pelaku pengadaan 3. Sertifikat UKPBJ Proaktif
			3. Persentase Pengendalian	80,00%	B03: Pembahasan Usulan Pengadaan Produk	B03: SK Sekjen tentang Pengadaan Produk

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
	4. Biro Hukum dan Kerjasama	1. Meningkatnya Kualitas Regulasi	1. Persentase Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Inisiatif Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan (Progsun).	75,10%	Impor	Impor
					B06: Pembahasan Usulan Pengadaan Produk Impor	B06: SK Sekjen tentang Pengadaan Produk Impor
					B09: Penyusunan Perubahan Kepmen P3DN	B09: Draft Kepmen tentang P3DN
					B12: Penyusunan Perubahan Kepmen P3DN	B12: Kepmen P3DN
					B03: Tahap Perencanaan & Persiapan. Penyiapan dasar penyusunan usulan RPPU progsun: 1. Inventarisasi kebutuhan regulasi berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja. 2. Identifikasi dan seleksi usulan RPPU yang akan masuk dalam Progsun. 3. Penyusunan draft awal Progsun Kementerian. 4. Koordinasi internal antar unit terkait (imigrasi & pemasarakatan). 5. Penetapan prioritas RPPU berdasarkan urgensi dan dampak kebijakan.	B03: Daftar prioritas RPPU dan draft Progsun awal
					B06: Tahap Penyusunan Awal Rancangan. Fokus pada mulai tersusunnya substansi regulasi: 1. Penyusunan naskah akademik (jika diperlukan). 2. Penyusunan draft awal RPPU sesuai Progsun. 3. Harmonisasi internal dengan unit teknis terkait. 4. Konsultasi awal dengan pemangku kepentingan (stakeholder). 5. Penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional.	B06: Draft awal RPPU + naskah akademik
					B09: Tahap Penyempurnaan & Harmonisasi. Tahap ini memastikan kualitas dan keselarasan regulasi: 1. Pembahasan lintas kementerian/lembaga. 2. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum (DJPP).	B09: Draft RPPU hasil harmonisasi (siap penetapan)

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					3. Penyempurnaan substansi dan redaksional RPPU. 4. Finalisasi draft RPPU tingkat kementerian.	
					B12: Tahap Penetapan. Tahap akhir untuk memastikan capaian indikator: 1. Proses penetapan RPPU menjadi peraturan (sesuai jenisnya). 2. Fasilitasi pengundangan dan publikasi. 3. Monitoring kesesuaian dengan Progsun (target vs realisasi).	B12: RPPU yang ditetapkan + laporan capaian indikator.
			2. Indeks Reformasi Hukum.	85,00	B03: Tahap Perencanaan & Penguatan Dasar. Fokus pada penyiapan strategi peningkatan Indeks Reformasi Hukum: 1. Identifikasi komponen penilaian Indeks Reformasi Hukum (misalnya: regulasi, deregulasi, harmonisasi, dan penegakan hukum). 2. Evaluasi capaian tahun sebelumnya dan identifikasi gap. 3. Penyusunan rencana aksi reformasi hukum tingkat kementerian. 4. Inventarisasi regulasi yang berpotensi tumpang tindih/ <i>over-regulated</i> . 5. Koordinasi awal dengan Kementerian Hukum sebagai pembina reformasi hukum.	B03: Dokumen rencana aksi reformasi hukum & peta regulasi bermasalah.
					B06: 1. Monitoring kelengkapan dokumen harmonisasi sesuai ketentuan 2. Pengendalian kehadiran Pimpinan Tinggi dalam rapat harmonisasi 3. Pemutakhiran dan aktivasi akun Perancang 4. Penugasan Perancang mengikuti pelatihan 5. Pelaksanaan pengembangan kompetensi hukum 6. Pembentukan dan pelaksanaan Analisis & Evaluasi regulasi 7. Pelaksanaan evaluasi regulasi prioritas 8. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut	B06: 1. Surat permohonan, draft regulasi, naskah akademik (jika wajib), surat pengantar pimpinan, matriks perubahan 2. Undangan, daftar hadir, notulensi, dokumentasi 3. Rekap data perancang, bukti akun aktif, surat keterangan 4. Surat tugas, sertifikat pelatihan, daftar hadir 5. Undangan kegiatan, Surat Tugas (jika ada), daftar hadir, materi, dokumentasi, Sertifikat (jika ada)

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					hasil evaluasi 9. Pelibatan Analis Hukum dalam evaluasi regulasi 10. Pemutakhiran dan validasi database JDIH	6. SK Tim Analisis & Evaluasi 7. Rencana kegiatan, laporan hasil evaluasi lengkap 8. Dokumen RTL, matriks monitoring, bukti perubahan 9. SK Tim, daftar hadir, pembagian tugas 10. E-report JDIH, bukti unggah regulasi
					B09: 1. Mengikuti proses verifikasi/penilaian IRH oleh BPHN 2. Penyampaian klarifikasi tambahan (jika ada) 3. Dokumentasi hasil sementara penilaian 4. Identifikasi potensi perbaikan	B09: Berita acara/verifikasi & catatan hasil penilaian
					B12: 1. Penerimaan hasil final nilai IRH 2. Evaluasi capaian indeks 3. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) 4. Integrasi hasil ke dalam LKJIP	B12: Nilai IRH & laporan evaluasi
					B03: Penyusunan dan finalisasi rancangan Peraturan Menteri tentang Advokasi	B03: 1. Draft RPermen Advokasi, 2. Naskah akademik 3. Notulen rapat pembahasan
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permintaan	100,00%	B06: Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) pembahasan RPermen Advokasi	B06: 1. Undangan kegiatan 2. Daftar hadir 3. Materi paparan 4. Notulen rapat 5. Dokumentasi kegiatan 6. Masukan/saran peserta 7. Laporan pelaksanaan FKP
					B09: Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan terkait Permen Advokasi pada beberapa Wilayah yang memiliki tingkat risiko permasalahan Hukum yang cukup tinggi	B09: 1. Surat tugas 2. Undangan sosialisasi/pembinaan 3. Materi sosialisasi 4. Daftar hadir peserta 5. Dokumen kegiatan 6. Laporan hasil sosialisasi 7. Rekap wilayah binaan
					B12: Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan	B12: 1. Instrumen monitoring dan evaluasi

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
		3. Terasilitasi dan Terlaksananya Kerja Sama	Persentase Terasilitasi Dan Terlaksananya Naskah Kerja Sama Dalam dan/atau Luar Negeri	100,00%	pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	2. Rekap permintaan layana bantuan hukum, 3. Rekap layanan yang telah diberikan 4. Layanan yang telah diberikan 5. Laporan evaluasi berkala 6. Rekomendasi tindak lanjut perbaikan layanan
					B03: 1. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama strategis (dalam dan luar negeri) berbasis prioritas nasional dan Renstra. 2. Penyusunan daftar rencana kerja sama (<i>long list & short list</i>). 3. Inisiasi komunikasi dan peninjauan awal dengan mitra potensial.	B03: Laporan dan dokumentasi
					B06: 1. Fasilitasi perundingan/negosiasi naskah kerja sama. 2. Harmonisasi substansi dengan unit teknis dan kementerian/lembaga terkait. 3. Finalisasi draft naskah kerja sama.	B06: Draf naskah kerja sama, laporan dan dokumentasi
					B09: 1. Pelaksanaan penandatanganan naskah kerja sama (MoU/PKS/Lol). 2. Diseminasi dan sosialisasi kepada unit pelaksana. 3. Penyusunan rencana implementasi (<i>action plan</i>) bersama mitra.	B09: Naskah kerja sama yang telah disepkati dan/ atau ditandatangani
					B12: 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. 2. Penyusunan laporan kinerja kerja sama (<i>output & outcome</i>). 3. Identifikasi tindak lanjut (<i>renewal, scaling-up, atau terminasi</i>).	B12: Laporan dan dokumentasi
	5. Biro Umum	1. Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Biro Umum	1. Persentase Layanan Keprotokoleran	100,00%	B03: Penataan Administrasi Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Pimpinan	B03: Arsip kegiatan sebelumnya dan Hasil Evaluasi Awal serta Undangan Kegiatan Dinas
					B06: Sosialisasi Keputusan Menteri Imigrasi dan	B06: Surat Tugas dan Jadwal Pelaksanaan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Pemasyarakatan tentang Keprotokolan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kewilayahan dan Monitoring serta Evaluasi	Sosialisasi serta Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
					B09: Pengembangan Standar Pelayanan Pimpinan	B09: Dokumen Standar Pelayanan Pimpinan
					B12: Evaluasi Tahunan Layanan Keprotokolan dan Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Keprotokoleran	B12: Rekapitulasi Kegiatan Keprotokoleran dalam 1 Tahun dan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan
					B03: 1. Terciptanya sistem persuratan yang baik dan terintegrasi 2. Terpenuhinya data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal	B03: 1. Laporan Triwulan I penggunaan Srikandi dan hasil <i>screenshot dashboard</i> akun Tata Usaha Biro Umum pada Srikandi 2. Laporan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi Triwulan I
		2. Terwujudnya Digitalisasi Arsip	Terwujudnya Digitalisasi Arsip Kementerian	100,00%	B06: 1. Terciptanya sistem persuratan yang baik dan terintegrasi 2. Terpenuhinya data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal	B06: 1. Laporan Triwulan II penggunaan Srikandi dan hasil <i>screenshot dashboard</i> akun Tata Usaha Biro Umum pada Srikandi 2. Laporan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi Triwulan II
					B09: 1. Terciptanya sistem persuratan yang baik dan terintegrasi 2. Terpenuhinya data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal	B09: 1. Laporan Triwulan III penggunaan Srikandi dan hasil <i>screenshot dashboard</i> akun Tata Usaha Biro Umum pada Srikandi 2. Laporan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi Triwulan III
					B12: 1. Terciptanya sistem persuratan yang baik dan terintegrasi 2. Terpenuhinya data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal	B12: 1. Laporan Triwulan IV / Tahunan penggunaan Srikandi dan hasil <i>screenshot dashboard</i> akun Tata Usaha Biro Umum pada Srikandi 2. Laporan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi Triwulan IV
					B03: 1. Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk	B03: 1. Laporan Penggunaan Aplikasi Srikandi

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
		Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Imigrasi dan Pemasarakatan		persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip 2. Sosialisasi Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 3. Target dari Arsip Nasional RI sebanyak 1440 item arsip yang berketerangan Permanen sesuai JRA 4. Membuat SK Tim tentang Layanan Informasi Kearsipan 5. Pembentukan Tim Penyusutan Arsip dan Pelaksanaan pemusnahan arsip 6. Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan B06: 1. Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik 2. Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip 3. Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 4. Target dari Arsip Nasional RI sebanyak 1440 item arsip yang berketerangan Permanen sesuai JRA 5. Membuat Layanan Informasi Arsip 6. Pengisian Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) berdasarkan Perka ANRI No.6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 7. Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan 8. Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Laporan Sosialisasi Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sesuai Tata Naskah Dinas 3. SK Tim tentang Layanan Informasi Kearsipan 4. SK Tim Penyusutan Arsip dan Pelaksanaan pemusnahan arsip 5. SK Tim Pengawasan Kearsipan B06: 1. Laporan pelaksanaan dan Alih Media Arsip Elektronik dengan lampiran pada aplikasi Star Sinergi Layanan Kearsipan (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Laporan Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip (sesuai Tata Naskah Dinas) 3. Laporan Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (sesuai Tata Naskah Dinas) 4. Laporan Layanan Informasi (helpdesk) tentang Kearsipan (sesuai Tata Naskah Dinas) 5. Laporan Pengisian Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) berdasarkan Perka ANRI No.6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 6. SK Tim Pembinaan Kearsipan dengan tupoksi : a. Penyusu-tan dan Pemusnah-an; b. Pembinaan Kearsipan; c. Pengawa-san kearsi-pan; d. Penunjukan Petugas Pengelola arsip / arsiparis

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B09: 1. Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik 2. Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip 3. Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 4. Target dari Arsip Nasional RI sebanyak 1440 item arsip yang berketerangan Permanen sesuai JRA 5. Pelaksanaan Penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip 6. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, Sumber Daya Kearsipan (prasarana dan sarana kearsipan dan SDM Kearsipan) 7. Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan dalam pengelolaan arsip aktif 8. Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan dalam pengelolaan arsip Inaktif	7. SK tim pelaksana alih media arsip B09: 1. Laporan pelaksanaan dan Alih Media Arsip Elektronik dengan lampiran pada aplikasi Star Sinergi Layanan Kearsipan (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Laporan Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip (sesuai Tata Naskah Dinas) 3. Laporan Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (sesuai Tata Naskah Dinas) 4. Laporan Pemindahan Arsip Inaktif arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/substantif (sesuai Tata Naskah Dinas) 5. Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, Sumber Daya Kearsipan (prasarana dan sarana kearsipan dan SDM Kearsipan) 6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan dalam pengelolaan arsip aktif 7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan dalam pengelolaan arsip Inaktif
					B12: 1. Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik 2. Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip 3. Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan	B12: 1. Laporan pelaksanaan dan Alih Media Arsip Elektronik dengan lampiran pada aplikasi Star Sinergi Layanan Kearsipan (sesuai Tata Naskah Dinas) 2. Laporan Penggunaan Aplikasi Srikandi untuk persuratan masuk, keluar, pemberkasan dan penyusutan arsip

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 4. Target dari Arsip Nasional RI sebanyak 1440 item arsip yang berketerangan Permanen sesuai JRA 5. Membuat Layanan Informasi Arsip 6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipan	(sesuai Tata Naskah Dinas) 3. Laporan Penggunaan Aplikasi Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (sesuai Tata Naskah Dinas) 4. Laporan Layanan Informasi (<i>helpdesk</i>) tentang Kearsipan (sesuai Tata Naskah Dinas) 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipan
	6. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, Citra Positif, dan Implementasi SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	90 informatif	B03: 1. Membentuk Tim PPID Kementerian 2. Membuat Laporan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian 3. Melaksanakan pembaruan informasi publik dan publikasi layanan publik Kementerian melalui laman resmi dan media sosial Kementerian 4. Melaksanakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi PPID tahun sebelumnya B06: 1. Melaksanakan pembaruan informasi publik dan publikasi layanan publik Kementerian melalui laman resmi dan media sosial Kementerian 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Tim PPID B09: 1. Melaksanakan pembaruan informasi publik dan publikasi layanan publik Kementerian melalui laman resmi dan media sosial Kementerian 2. Melaksanakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi PPID tahun sebelumnya B12: 1. Melaksanakan pembaruan informasi publik dan publikasi layanan publik Kementerian melalui laman resmi dan media sosial Kementerian 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi	B03: 1. SK Tim PPID 2. Laporan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian 3. Laporan pelaksanaan PPID 4. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi PPID tahun sebelumnya B06: 1. Laporan pelaksanaan PPID 2. Laporan monitoring dan evaluasi PPID B09: 1. Laporan pelaksanaan PPID 2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi PPID tahun sebelumnya B12: 1. Laporan pelaksanaan PPID 2. Laporan monitoring dan evaluasi PPID

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Tim PPID	
			2. Persentase Pemberitaan Positif Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terhadap Total Pemberitaan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	80,00%	B03: Melakukan monitoring pemberitaan terkait Kemenimipas berdasarkan analisis dari Ditjenpas dan Ditjenim	B03: Laporan monitoring pemberitaan positif kemenimipas
					B06: Melakukan monitoring pemberitaan terkait Kemenimipas berdasarkan analisis dari Ditjenpas dan Ditjenim	B06: Laporan monitoring pemberitaan positif kemenimipas
					B09: Melakukan monitoring pemberitaan terkait Kemenimipas berdasarkan analisis dari Ditjenpas dan Ditjenim	B09: Laporan monitoring pemberitaan positif kemenimipas
					B12: Melakukan monitoring pemberitaan terkait Kemenimipas berdasarkan analisis dari Ditjenpas dan Ditjenim	B12: Laporan monitoring pemberitaan positif kemenimipas
			3. Nilai SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Baik	B03:	B03:
					B06: Penerapan Kebijakan terkait SPBE di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	B06: Dokumen pengaturan berkaitan dengan SPBE di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
					B09: Melakukan proses evaluasi belanja TIK (<i>Clearance</i> SPBE) atas anggaran selaras dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029	B09: Dokumen output Rekomendasi belanja TIK (<i>Clearance</i> SPBE) dari sistem evaluasi anggaran SPBE
					B12: 1. Monitoring dan Evaluasi Internal Implementasi SPBE di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2. Penganggaran pembangunan atau pengembangan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 3. Implementasi aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029	B12: 1. Laporan Evaluasi Implementasi SPBE di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 2. Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 3. Laporan Kegiatan Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Aplikasi berdasarkan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE (sesuai Tata Naskah Dinas)

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
			4. Indeks Pembangunan Statistik	3,39	B03: 1. Penyusunan Standar data Statistik 2. Penyusunan Metadata Statistik B06: 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal penyelenggaraan statistik sectoral 2. Perencanaan Data Statistik B09: 1. Penyelenggaraan Kegiatan Statistik 2. Penyebarluasan Data Statistik Kementerian 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik B12: 1. Penyusunan Metadata Statistik 2. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik	B03: 1. Dokumen Usulan Standar Data Statistik dari UKE-1 2. Dokumen Usulan Metadata Statistik dari UKE-1 B06: 1. Permen Imipas tentang Satu Data Kementerian Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor SOP penyelenggaraan Data (Percanaan Penyebarluasan data) 2. KAK Kegiatan Statistik 3. Capture Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik melalui Aplikasi Romantik B09: 1. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik 2. Capture Portal Data Kementerian 3. Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Statistik B12: 1. Dokumen Usulan Metadata Statistik dari UKE-1 2. Dokumen laporan Tindak Lanjut Monitoring Kegiatan dan Evaluasi Statistik
			5. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5	B03: 1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 2. Menyusun SOP Penanganan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi LAPOR 3. Menindaklanjuti Laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 4. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 5. Menindaklanjuti hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam	B03: 1. SK Petugas Penanganan Pengaduan 2. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, twitter, instagram, WA, Line) 3. Dokumen laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangan oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja. 4. Dokumen SOP Penanganan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 6. Pembinaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pejabat penghubung aplikasi LAPOR	pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi LAPOR 5. Laporan Penanganan Pengaduan yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja 6. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan IV Tahun 2025) 7. Laporan tindak lanjut hasil monev pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan IV Tahun 2025) 8. Laporan pembinaan pengelolaan pengaduan masyarakat (sesuai Tata Naskah Dinas)
					B06: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 2. Menindaklanjuti hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	B06: 1. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan I Tahun 2026) 2. Laporan tindak lanjut hasil monev pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan I Tahun 2026)
					B09: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 2. Menindaklanjuti hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 3. Pembinaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pejabat penghubung	B09: 1. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan II Tahun 2026) 2. Laporan tindak lanjut hasil monev pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan II Tahun 2026) 3. Laporan pembinaan pengelolaan pengaduan masyarakat (sesuai Tata Naskah Dinas)

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					aplikasi LAPOR	
					B12: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR 2. Menindaklanjuti hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	B12: 1. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan III Tahun 2026) 2. Laporan tindak lanjut hasil monev pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwulan III Tahun 2026)
					B03: Evaluasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025	B03: Laporan Evaluasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025
					B06: 1. Pembentukan Tim untuk Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 2. Permintaan Usulan Kebijakan untuk Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026	B06: 1. Surat Keputusan Menteri tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 2. Daftar Kebijakan yang akan dilakukan <i>self assesment</i> oleh Tim IKK Kemenimipnas
					B09: 1. Evaluasi Implementasi dan Keberlanjutan Kebijakan ke Wilayah sampling terhadap seluruh/sebagian usulan kebijakan yang akan diusulkan ke dalam Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (<i>Self-Assessment</i>) dengan mekanisme diskusi panel antara Unit Pemilik Kebijakan dengan Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 3. Penyampaian resmi usulan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026	B09: 1. Laporan Kegiatan Evaluasi Implementasi dan Keberlanjutan Kebijakan yang akan diusulkan ke dalam Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 2. Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri (<i>Self Assesment</i>) terhadap kebijakan yang akan diusulkan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 3. Berita Acara Penetapan Usulan Kebijakan Tahun 2026
	7. Pusat Strategi dan Kebijakan	1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	86,00	B12: B03: Sosialisasi rencana penyesuaian pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM - Publikasi Hasil SPAK-	B12: B03: 1. Dokumen kegiatan sosialisasi dengan seluruh Unit Eselon I/ internalisasi
		2. Terlaksananya Survei Persepsi Kualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Imigrasi	88,40		

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
		Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP - SPAK) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	dan Pemasarakatan		SPKPSKM secara offline dan online (melalui <i>website</i> , media sosial, dll)	pendampingan terkait penyesuaian pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM: a. undangan b. daftar hadir c. notula dan d. dokumentasi foto e. laporan kegiatan 2. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada <i>website</i> , media sosial, dll. 3. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik <i>QR Code</i> (indikator merah, kuning, hijau dan biru). Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja
					B06: 1. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara offline dan online (melalui <i>website</i> , media sosial, dll) 2. Monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK.	B06: 1. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada <i>website</i> , media sosial, dll. 2. Laporan monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik <i>QR Code</i> (indikator merah, kuning, hijau dan biru). Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja
					B09: 1. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara	B09: 1. Dokumen foto atau capture publikasi

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					offline dan online (melalui website, media sosial, dll) 2. Monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK.	hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada website, media sosial, dll. 2. Laporan monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik QR Code (indikator merah, kuning, hijau dan biru). Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja
					B12: 1. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara offline dan online (melalui <i>website</i>, media sosial, dll) 2. Monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM Tahun 2026	B12: 1. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada website, media sosial, dll. 2. Laporan monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Dokumentasi Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM Tahun 2026 a. Undangan b. daftar hadir c. notula d. dokumentasi e. laporan kegiatan
			2. Indeks Persepsi Korupsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	88,40	B03: 1. Sosialisasi rencana penyesuaian pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM 2. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara offline dan online (melalui website, media sosial, dll)	B03 1. Dokumen kegiatan sosialisasi dengan seluruh Unit Eselon I/ internalisasi pendamping-an terkait penyesuaian pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM: a. Undangan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						b. daftar hadir c. notula d. dokumentasi foto e. laporan kegiatan 2. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada website, media sosial, dll. 3. Laporan tindak lanjut hasil SPAK dan SPKP per Triwulan 4. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik QR Code (indikator merah, kuning, hijau dan biru) Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja
					B06: 1. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara offline dan online (melalui website, media sosial, dll) 2. Monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK.	B06: 1. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada website, media sosial, dll. 2. Laporan monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Laporan tindak lanjut hasil SPAK dan SPKP per Triwulan 4. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik QR Code (indikator merah, kuning, hijau dan biru) Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B09: 1. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara offline dan online (melalui website, media sosial, dll) 2. Monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK.	B09: 1. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada website, media sosial, dll. 2. Laporan monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Laporan tindak lanjut hasil SPAK dan SPKP per Triwulan 4. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik QR Code (indikator merah, kuning, hijau dan biru). Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja
					B12: 1. Publikasi Hasil SPAK-SPKPSKM secara offline dan online (melalui website, media sosial, dll) 2. Monitoring verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM di wilayah dengan memprioritaskan satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM dan WBK. 3. Evaluasi Pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM Tahun 2026	B12: 1. Dokumen kegiatan sosialisasi dengan seluruh Unit Eselon II/ internalisasi pendampingan terkait penyesuaian pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM: a. Undangan; b. Daftar hadir; c. Notula; d. Dokumentasi foto; e. Laporan kegiatan. 2. Dokumen foto atau capture publikasi hasil SPAK-SPKP/SKM secara offline atau pada website, media sosial, dll. 3. Laporan tindak lanjut hasil SPAK dan SPKP per Triwulan 4. Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM satuan kerja setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik QR Code (indikator merah, kuning,

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						hijau dan biru). Keterangan: Laporan hasil pelaksanaan SPAK-SPKP/SKM dapat diunduh melalui aplikasi STARApp Survei 3A menggunakan akun operator masing-masing satuan kerja
Inspektorat Jenderal	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal	100%	B03: Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh	B03: Laporan Pelaksanaan rencana aksi RB General dan/atau Tematik B03
					B06: Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh	B06: Laporan Pelaksanaan rencana aksi RB General dan/atau Tematik B06
					B09: Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh	B09: Laporan Pelaksanaan rencana aksi RB General dan/atau Tematik B09
					B12: Melaksanakan rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik secara menyeluruh	B12: Laporan Pelaksanaan rencana aksi RB General dan/atau Tematik B12
			2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,52	B03:	B03:
					B06: Melaksanakan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal	B06: Laporan Pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal
					B09:	B09:
					B12: Melaksanakan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal	B12: Laporan Pelaksanaan Survei Layanan Kesekretariatan Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal	2. Inspektorat Wilayah I	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	70,00	B03:	B03:
					B06: 1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat internal dan melakukan monitoring tindak lanjut 2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi serta penetapan batas waktu penyelesaian 3. Koordinasi dan Rekonsiliasi Dengan Satker atas Temuan Yang Belum Ditindaklanjuti 4. Koordinasi dengan BPK/Instansi terkait untuk percepatan penyelesaian temuan	B06: 1. Laporan Hasil monitoring tindak lanjut telaah sejawat intern 2. Persentase TLHP tepat waktu & surat edaran batas waktu 3. Laporan Kegiatan koordinasi 4. Laporan Kegiatan 5. Dokumen Kebijakan anti korupsi & dokumen peta Risiko 6. Laporan Hasil monitoring evaluasi SAKIP 7. Laporan Ikhtisar Pengawasan dan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					5. Penyusunan kebijakan anti korupsi, perencanaan pembelajaran, dan asesmen risiko fraud 6. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip 7. Penyusunan laporan pengelolaan kinerja secara berkala (semester, tahunan)	Laporan Kinerja
					B09:	B09:
					B12: 1. Mengusulkan permintaan anggaran untuk kegiatan pengawasan yang mendesak 2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi serta penetapan batas waktu penyelesaian 3. Koordinasi dan Rekonsiliasi Dengan Satker atas Temuan Yang Belum Ditindaklanjuti 4. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 5. Penyusunan laporan pengelolaan kinerja secara berkala (semester, tahunan)	B12: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Persentase TLHP tepat waktu & surat edaran batas waktu 3. Laporan Kegiatan koordinasi 4. Laporan Hasil monitoring evaluasi SAKIP 5. Laporan Ikhtisar Pengawasan dan Laporan Kinerja
					B03: B06: 1. Melaksanakan identifikasi dan monitoring kebutuhan data dukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan telaah sejawat 2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 3. Koordinasi dan rekonsiliasi dengan satker atas yang belum ditindaklanjuti 4. Koordinasi dengan BPK/Instansi terkait untuk percepatan penyelesaian temuan 5. Penyusunan kebijakan anti korupsi, perencanaan pembelajaran, dan asesmen risiko fraud 6. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip 7. Penyusunan laporan pengelolaan kinerja secara berkala (semester, tahunan)	B03: B06: 1. Laporan identifikasi dan monitoring pemenuhan data dukung telaahan sejawat 2. Laporan pendampingan penyelesaian TLHP 3. Laporan Kegiatan koordinasi 4. Laporan Kegiatan 5. Dokumen Kebijakan anti korupsi & dokumen peta risiko 6. Laporan Hasil Monitoring Evaluasi SAKIP 7. Laporan Ikhtisar Pengawasan dan Laporan Kinerja
	3. Inspektorat Wilayah II	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	70,00	B09:	B09:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B12: 1. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan koordinator pengawasan 2. Koordinasi dan rekonsiliasi dengan satker atas temuan yang belum ditindaklanjuti 3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 4. Penyusunan laporan pengelolaan kinerja secara berkala (semester, tahunan)	B12: 1. Laporan Kegiatan koordinasi 2. Laporan Kegiatan koordinasi 3. Laporan Hasil Monitoring Evaluasi SAKIP 4. Laporan Ikhtisar Pengawasan dan Laporan Kinerja
	4. Inspektorat Wilayah III	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Inspektorat Wilayah III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	70,00	B03: B06: 1. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan koordinator pengawasan 2. Melaksanakan Kegiatan Pendampingan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 3. Melaksanakan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Atas Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan Eksternal 4. Melaksanakan kegiatan pendampingan atas penyusunan data dukung Evaluasi SPIP bagi Satuan kerja 5. Melaksanakan kegiatan pendampingan atas penyusunan data dukung evaluasi SAKIP bagi Satuan Kerja 6. Melaksanakan Komunikasi Secara Berkala Dengan Koordinator Pengawasan	B03: B06: 1. Laporan pendampingan penyelesaian TLHP 2. Laporan pendampingan penyelesaian TLHP 3. Laporan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal 4. Laporan Pendampingan SPIP 5. Laporan pendampingan SAKIP 6. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kinerja Secara Berkala (Semester, Tahunan)
					B09: B12: 1. Melaksanakan identifikasi dan monitoring kebutuhan data dukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan telaah sejawat 2. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan koordinator pengawasan 3. Melaksanakan Kegiatan Pendampingan atas 4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 5. Melaksanakan Komunikasi Secara Berkala Dengan Koordinator Pengawasan	B09: B12: 1. Laporan identifikasi dan monitoring pemenuhan data dukung telaahan sejawat 2. Laporan Kegiatan Koordinasi 3. Laporan pendampingan penyelesaian TLHP 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kinerja Secara Berkala (Semester, Tahunan)
	5. Inspektorat	Meningkatnya	Tingkat Kualitas	70,00	B03:	B03:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
	Wilayah IV	Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Inspektorat Wilayah IV	Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV		B06: 1. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil telaah sejawat internal 2. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut hasil telaah sejawat internal 3. Penetapan batas waktu (time bound) tindak lanjut rekomendasi disertai mekanisme pengingat dan pelaporan berkala kepada pimpinan 4. Penegasan peran dan tanggung jawab pimpinan satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut melalui surat edaran/pedoman internal 5. Membuat kegiatan koordinasi/rekonsiliasi secara berkala dengan Satuan Kerja yang belum Tuntas melaksanakan rekomendasi ltjen 6. Membuat kegiatan Sosialisasi dan/atau Konsultasi terkait aturan pengelolaan keuangan negara dan Pencegahan Temuan Berulang 7. Melaksanakan Komunikasi secara berkala dengan coordinator pengawasan 8. Membuat Kebijakan Anti Korupsi yang mencakup aspek Cegah-Deteksi-Respons dan Fraud Risk Assesment 9. Membuat perencanaan pembelajaran antikorupsi 10. Membuat asesmen Risiko korupsi dan peta Risiko fraud 11. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Evaluasi SAKIP 12. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 13. Menyusun Laporan Pengelolaan Kinerja sesuai dengan periode waktu (semester, dan tahunan)	B06: 1. Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Telaah Sejawat Intern 2. Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Telaah Sejawat Intern 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal 5. Laporan Kegiatan 6. Laporan Kegiatan 7. Laporan Kegiatan 8. Dokumen Kebijakan Anti Korupsi 9. Dokumen Rencana Pembelajaran dan Peta Risiko 10. Dokumen Rencana Pembelajaran dan Peta Risiko 11. Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 12. Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 13. Laporan Ikhtisar Pengawasan & Laporan Kinerja Intern
					B09:	B09:
					B12: 1. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil telaah sejawat internal	B12: 1. Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Telaah

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					2. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut hasil telaah sejawat internal 3. Membuat permintaan anggaran untuk kegiatan pengawasan yang mendesak kepada Ditjen Imigrasi 4. Penetapan batas waktu (time bound) tindak lanjut rekomendasi disertai mekanisme pengingat dan pelaporan berkala kepada pimpinan 5. Penegasan peran dan tanggung jawab pimpinan satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut melalui surat edaran/pedoman internal 6. Membuat kegiatan koordinasi/rekonsiliasi secara berkala dengan Satuan Kerja yang belum Tuntas melaksanakan rekomendasi Itjen 7. Membuat kegiatan Sosialisasi dan/atau Konsultasi terkait aturan pengelolaan keuangan negara dan Pencegahan Temuan Berulang 8. Melaksanakan Komunikasi secara berkala dengan coordinator pengawasan 9. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Evaluasi SAKIP 10. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP- Menyusun Laporan Pengelolaan Kinerja sesuai dengan periode waktu (semester, dan tahunan)	Sejawat Intern 2. Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Telaah Sejawat Intern 3. Laporan Hasil Pengawasan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal 6. Laporan Kegiatan 7. Laporan Kegiatan 8. Laporan Kegiatan 9. Laporan Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil evaluasi SAKIP 10. Laporan Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil evaluasi SAKIP 11. Laporan Ikhtisar Pengawasan & Laporan Kinerja Intern
Direktorat Jenderal Imigrasi	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi	Meningkatnya pelaksanaan RB dilingkup Ditjen Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi	100%	B03: Internalisasi pemenuhan data dukung RAT RB tiap triwulan (periode B03) kepada Satuan Kerja	B03: Laporan penyampaian pelaksanaan pemenuhan rencana aksi periode B03 tahun 2026
					B06: Internalisasi pemenuhan data dukung RAT RB tiap triwulan (periode B06) kepada Satuan Kerja	B06: Laporan penyampaian pelaksanaan pemenuhan rencana aksi periode B06 tahun 2026
					B09: Internalisasi pemenuhan data dukung RAT RB tiap triwulan (periode B09) kepada Satuan Kerja	B09: Laporan penyampaian pelaksanaan pemenuhan rencana aksi periode B09 tahun 2026

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
			2. Indeks Kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,52 (Indeks)	B12: Internalisasi pemenuhan data dukung RAT RB tiap triwulan (periode B12) kepada Satuan Kerja	B12: Laporan penyampaian pelaksanaan pemenuhan rencana aksi periode B12 tahun 2026
					B03: Sosialisasi program layanan pada fungsi kesesditan	B03: Laporan Sosialisasi program layanan Perencanaan kepada seluruh satker
					B06: Monev anggaran seluruh satker	B06: Laporan Monev anggaran seluruh satker
					B09: Pendampingan Pengukuran dan Penyusunan Pelaporan Kinerja	B09: Dokumen undangan, notulen, absensi, dokumentasi dan laporan kegiatan Pendampingan Pengukuran dan Penyusunan Pelaporan Kinerja
					B12: 1. Pengukuran kepuasan unit kerja seluruh satker 2. Penyusunan laporan evaluasi kepuasan unit kerja	B12: Laporan evaluasi kepuasan unit kerja atas layanan kesekretariatan
	2. Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Optimalnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Indeks Keamanan dan Pencegahan Atas Masuknya Ancaman Keimigrasian	95	B03: Inventarisasi kebutuhan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI sesuai dengan <i>pilot project</i> pada Rencana Aksi Ditjen Imigrasi.	B03: Dokumen Inventarisasi kebutuhan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI sesuai dengan <i>pilot project</i> pada Rencana Aksi Ditjen Imigrasi.
					B06: Monitoring Persiapan dan pengadaan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI.	B06: Laporan Monitoring Persiapan dan pengadaan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI.
					B09: Monitoring Distribusi autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI.	B09: Laporan Monitoring Distribusi autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI.
					B12: 1. Operasionalisasi penuh dan berkelanjutan; 2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI.	B12: 1. Laporan operasionalisasi penuh dan berkelanjutan; 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI.
	3. Direktorat Izin Tinggal dan	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin	Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status	92,20	B03: Persiapan penyusunan perubahan regulasi	B03: Laporan kegiatan rapat persiapan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
	Status Keimigrasian	Tinggal dan Status Keimigrasian	Keimigrasian		tentang golden visa.	penyusunan perubahan regulasi.
					B06: -	B06: -
					B09: -	B09: -
					B12: Sosialisasi, Diseminasi, dan Evaluasi Penerapan Regulasi.	B12: 1. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi; 2. Laporan evaluasi penerapan regulasi yang menunjukkan peningkatan jumlah investor.
	4. Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan	Meningkatnya Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan	Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan	92,20	B03: Persiapan penyusunan perubahan regulasi tentang visa.	B03: Laporan kegiatan rapat persiapan penyusunan perubahan regulasi.
					B06: -	B06: -
					B09: -	B09: -
					B12: Sosialisasi, Diseminasi, dan Evaluasi Penerapan Regulasi.	B12: 1. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi; 2. Laporan evaluasi penerapan regulasi yang menunjukkan peningkatan jumlah investor.
	5. Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai Enabler Layanan Keimigrasian	1. Tingkat Ketersediaan Laynan TIK Ditjen Imigrasi (Avaibility Time)	92,5%	B03: Evaluasi Layanan Jaringan Komputer Keimigrasian dengan pihak/mitra.	B03: Laporan Evaluasi Layanan Jaringan Komputer Keimigrasian dengan pihak/mitra yang memuat downtime Jaringan dan Aplikasi.
					B06: Penguatan Fitur Web Aplikasi Firewall.	B06: Laporan pelaksanaan Perpanjangan Lisensi <i>Web Application Firewall (WAF)</i> dengan menerapkan metode <i>High Availability (HA)</i> .
					B09: Penambahan fitur <i>Database Security</i> .	B09: Laporan pelaksanaan implementasi Lisensi Perlindungan dan Privasi Database.
					B12: Evaluasi seluruh fitur pengamanan SIMKIM.	B12: Laporan hasil evaluasi fitur pengamanan SIMKIM.
			2. Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian	95%	B03: Inventarisasi Kehandalan Sistem TI Keimigrasian pada Aplikasi E-Visa.	B03: Laporan hasil survey Kehandalan Sistem TI Keimigrasian pada Aplikasi E-Visa.
					B06:	B06:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Pelaksanaan Rapat Rutin Tim Percepatan Penanganan Masalah Kesisteman (P2MK) dengan Direktorat Teknis- Aplikasi E-Visa.	Laporan Hasil Rapat Penanganan Masalah Kesisteman (P2MK) untuk Aplikasi E-Visa.
					B09: Melakukan rapat Koodinasi dengan Direktorat Teknis terkait untuk mengevaluasi penggunaan Aplikasi E-Visa.	B09: Laporan UAT penggunaan Aplikasi E-Visa.
					B12: Evaluasi penggunaan Aplikasi E-Visa dengan pihak/mitra.	B12: Laporan hasil survey Kehandalan Sistem TI Keimigrasian pada Aplikasi E-Visa.
			3. Presentase Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi	100%	B03: Penyesuaian Dipa terhadap kebutuhan anggaran sesuai proyek TIK Ditjenim.	B03: 1. Dipa Revisi; 2. Ralisasi Anggaran.
					B06: Inventarisasi dan verifikasi dokumen-dokumen pengadaan proyek TIK.	B06: Daftar inventarisasi kelengkapan dokumen pengadaan.
					B09: Monitoring dan evaluasi penyelesaian proyek TIK.	B09: Laporan Monitoring dan evaluasi penyelesaian proyek TIK.
					B12: Evaluasi Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi.	B12: Laporan Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi.
	6. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	1. Indeks Penegakan Hukum yang ditangani (Pro Yustita dan/atau Tindakan Administrasi Keimigrasian)	91,54	B03: Evaluasi pengembangan fitur APGAKUM.	B03: Laporan Evaluasi kebutuhan pengembangan fitur APGAKUM.
					B06: Implementasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan APGAKUM pasca pengembangan.	B06: Laporan Implementasi APGAKUM pasca pengembangan.
					B09: Implementasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan APGAKUM pasca pengembangan.	B09: Laporan Implementasi APGAKUM pasca pengembangan.
					B12: Monev optimalisasi aplikasi APGAKUM pasca pengembangan.	B12: Monev optimalisasi aplikasi APGAKUM pasca pengembangan.
			2. Presentase Pengawasan Keimigrasian	100%	B03: Evaluasi efektivitas implementasi APOA.	B03: Laporan Evaluasi kebutuhan pengembangan fitur APGAKUM.
					B06:	B06:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Tindak lanjut hasil evaluasi dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan dengan target peningkatan <i>user</i> APOA.	Tindak lanjut hasil evaluasi dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan dengan target peningkatan <i>user</i> APOA.
					B09: Tindak lanjut hasil evaluasi dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan dengan target peningkatan <i>user</i> APOA.	B09: Tindak lanjut hasil evaluasi dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan dengan target peningkatan <i>user</i> APOA.
					B12: Monev peningkatan pengguna <i>user</i> APOA.	B12: Laporan Monev peningkatan pengguna <i>user</i> APOA.
	7. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan	1. Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian	Presentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian dan Ditindaklanjuti	97%	B03: Inventarisasi seluruh PKS/MoU yang masih aktif dan penyusunan matriks tindak lanjut kerja sama tahun 2026.	B03: Matriks inventarisasi PKS/MoU, daftar kerja sama aktif.
					B06: Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit teknis dan mitra kerja sama untuk monitoring implementasi PKS/MoU.	B06: Undangan rapat, daftar hadir, notulensi, laporan hasil rapat koordinasi.
					B09: Fasilitasi penyusunan dan penyelesaian tindak lanjut kerja sama berupa pertukaran data yang dibutuhkan, Melakukan rapat Koodinasi atau kegiatan Paket Meeting dengan pihak/mitra.	B09: Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, berita acara, dokumentasi kegiatan.
					B12: Evaluasi pelaksanaan kerja sama keimigrasian dan penyusunan laporan capaian tindak lanjut PKS/MoU.	B12: Laporan evaluasi kerja sama, matriks tindak lanjut yang diperbarui, laporan capaian kinerja tahunan.
		2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	1. Presentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	97%	B03: Monitoring tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri.	B03: Laporan monitoring tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri.
					B06: Monitoring tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri.	B06: Laporan monitoring tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri.
					B09: Penguatan tugas dan fungsi Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri (Rakor	B09: Laporan Penguatan tugas dan fungsi Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Atim).	Negeri.
					B12: Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri.	B12: Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Keimigrasian pada perwakilan RI di Luar Negeri.
			2. Presentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	91%	B03: 1. Menginventarisasi informasi terkait rencana pelaksanaan pengawasan keimigrasian dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri; 2. Menyusun konsep pedoman yang isinya mencakup: mekanisme pelaksanaan koordinasi, mekanisme pengawasan WNI di luar negeri, mekanisme pencegahan TPPO di luar negeri, mekanisme kunjungan pada WNI di rumah tahanan di negara penerima, mekanisme pembentukan jaringan informan; 3. Membahas dengan direktorat terkait; 4. Melakukan harmonisasi dengan Bagian Perencanaan.	B03: 1. Laporan/telaah staf mengenairencana pelaksanaan pengawasan keimigrasian dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri; 2. Konsep pedoman.
					B06: 1. Menyusun konsep pedoman; 2. Membahas dengan direktorat terkait 3. Membahas dengan pelaksana fungsi imigrasi di luar negeri 4. Melakukan harmonisasi dengan Bagian Perencanaan 5. Menetapkan Pedoman Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri; 6. Melakukan konsinyering dan sosialisasi pedoman	B06: 1. Pedoman yang telah ditetapkan; 2. Laporan Sosialisasi
					B09: 1. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Pengawasan Keimigrasian dalam rangka perlindungan WNI di Luar Negeri; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dalam rangka perlindungan WNI di Luar Negeri.	B09: Laporan Sosialisasi, monitoring danevaluasi.

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B12: 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dalam rangka perlindungan WNI di Luar Negeri; 2. Membuat Laporan akhir dan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pimpinan.	B12: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi; 2. Laporan akhir dan rekomendasi Kebijakan
	8. Direktorat Kepatuhan Internal	Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Fasilitasi Advokasi, dan Investigasi Internal	Indeks Integritas Pegawai	80,45	B03 1. Internalisasi terkait fungsi Patnal, Pencegahan Korupsi, Pengendalian gratifikasi dan kode etik; 2. Internalisasi SPIP dan MR	B03: 1. Laporan Internalisasi terkait fungsi Patnal, Pencegahan Korupsi, Pengendalian gratifikasi dan kode etik; 2. Laporan Internalisasi SPIP dan MR.
					B06: 1. Internalisasi terkait fungsi Patnal, Pencegahan Korupsi, Pengendalian gratifikasi dan kode etik; 2. Internalisasi SPIP dan MR.	B06: 1. Laporan Internalisasi terkait fungsi Patnal, Pencegahan Korupsi, Pengendalian gratifikasi dan kode etik; 2. Laporan Internalisasi SPIP dan MR.
					B09 Sosialisasi penguatan kepatuhan Internal kepada seluruh satuan kerja.	B09 Laporan Sosialisasi penguatan kepatuhan Internal kepada seluruh satuan kerja.
					B12: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP dan MR.	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP dan MR.
	9. Direktorat Intelijen Keimigrasian	Optimalnya Pengamanan Keimigrasian Melalui Produk Intelijen Keimigrasian yang Berkualitas	1. Presentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti	97%	B03: Terlaksananya penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas melalui monev pada UPT Keimigrasian.	B03: Laporan pelaksanaan monev penguatan penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas pada UPT Keimigrasian.
					B06: Terlaksananya penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas melalui monev pada UPT Keimigrasian.	B06: Laporan pelaksanaan monev penguatan penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas pada UPT Keimigrasian.
					B09: Terlaksananya penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas melalui monev pada UPT Keimigrasian.	B09: Laporan pelaksanaan monev penguatan penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas pada UPT Keimigrasian.
					B12:	B12:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					Terlaksananya Evaluasi Produk Intelijen Keimigrasian yang berkualitas.	Surat Evaluasi Tahunan Produk Intelijen Keimigrasian.
			2. Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti	97%	B03: Terlaksananya penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas melalui monev pada UPT Keimigrasian.	B03: Laporan pelaksanaan monev penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas pada UPT Keimigrasian.
					B06: Terlaksananya penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas melalui monev pada UPT Keimigrasian.	B06: Laporan pelaksanaan monev penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas pada UPT Keimigrasian.
					B09: Terlaksananya penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas melalui monev pada UPT Keimigrasian.	B09: Laporan pelaksanaan monev penguatan intelijen dalam penyusunan LHI dan Kirka yang berkualitas pada UPT Keimigrasian.
					B12: Terlaksananya Evaluasi Produk Intelijen Keimigrasian yang berkualitas.	B12: Surat Evaluasi Tahunan Produk Intelijen Keimigrasian.
			3. Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Keimigrasian Melalui Dasa Binaan	94%	B03: 1. Identifikasi dan pemetaan desa yang memiliki atau terindikasi tingkat kerawanan tinggi terhadap TPPO TPPM di wilayah kerja masing-masing; 2. Penetapan PIMPASA oleh Kanwil yang diusulkan Kanim; 3. Persiapan Bimtek bagi PIMPASA; 4. Penyusunan rencana kerja sama dengan instansi terkait dan organisasi/Lembaga masyarakat lainnya di tingkat UPT dengan pengawalan Kanwil.	B03: 1. Dokumen Identifikasi dan pemetaan desa yang memiliki atau terindikasi tingkat kerawanan tinggi terhadap TPPO TPPM di wilayah kerja masing-masing; 2. SK Penetapan PIMPASA oleh Kanwil yang diusulkan Kanim; 3. Laporan Persiapan Bimtek bagi PIMPASA; 4. Laporan Penyusunan rencana kerja sama dengan instansi terkait dan organisasi/ Lembaga masyarakat lainnya di tingkat UPT dengan pengawalan Kanwil.
					B06: 1. Penetapan pemetaan desa yang memiliki risiko TPPO/TPPM secara berkala; 2. Pelaksanaan Bimtek; 3. Penjajakan penyusunan rencana Kerja Sama dengan instansi terkait dan	B06: 1. SK Penetapan pemetaan desa yang memiliki risiko TPPO/TPPM secara berkala; 2. Laporan Pelaksanaan Bimtek; 3. Laporan Penjajakan penyusunan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					organisasi/Lembaga masyarakat lainnya di tingkat UPT dengan pengawasan Kanwil.	rencana Kerja Sama dengan instansi terkait dan organisasi/Lembaga masyarakat lainnya di tingkat UPT dengan pengawasan Kanwil.
					B09: 1. Pelaksanaan Bimtek; 2. Perumusan naskah dan penandatanganan kerja sama	B09: 1. Laporan Pelaksanaan Bimtek; 2. Naskah kerja sama yang telah ditandatangani
					B12: 1. Monev Penyuluhan hukum keimigrasian oleh PIMPASA Kantor Imigrasi untuk mencegah TPPO dan TPPM pada desa binaan Imigrasi; 2. Monev pelaksanaan Bimtek dan kerja sama.	B12: 1. Laporan Monev Penyuluhan hukum keimigrasian oleh PIMPASA Kantor Imigrasi untuk mencegah TPPO dan TPPM pada desa binaan Imigrasi; 2. Laporan Monev pelaksanaan Bimtek dan kerja sama.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan	100%	B03: 1. Memfasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi; 2. Mengusulkan satuan kerja Pemasyarakatan menuju WBK/WBBM Tahun 2026.	B03: Surat Perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.1-SA.04.01-1432 perihal Pemenuhan Data Dukung Rencana Aksi Tahunan
					B06: 1. Melaksanakan RB general dan tematik; 2. Menyusun dan pemenuhan rencana kerja tahunan.	B06:
					B09: 1. Menganalisa dan Mengolah data perencanaan dan reformasi; 2. Menyusun dan pemenuhan rencana kerja tahunan.	B09:
					B12: 1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi Birokrasi; 2. Menyusun dan pemenuhan rencana kerja tahunan.	B12:
			2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan	3,52	B03: Mengukur layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan kepada pegawai dengan menggunakan 10	B03: Link survei indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
			terhadap layanan kesekretariatan		parameter. B06: Mengukur layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Pemasarakatan kepada pegawai dengan menggunakan 10 parameter. B09: Mengukur layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Pemasarakatan kepada pegawai dengan menggunakan 10 parameter. B12: Mengukur layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Pemasarakatan kepada pegawai dengan menggunakan 10 parameter.	B06: B09: B12:
	2. Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	100%	B03: 1. Rapat Internal Penyusunan kerangka awal dan Ruang Lingkup Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan; 2. Penetapan Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan. B06: 1. Penyusunan Identifikasi substansi mekanisme Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan, uji petik pada Balai Pemasarakatan; 2. Sosialisasi Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan B09: Penyusunan Draft Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan, Inventarisasi SOP Eksisting, uji petik lanjutan dan FGD dengan Pemangku kepentingan	B03: 1. Laporan Rapat Internal Penyusunan Draft Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan 2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-05.OT.02.02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan, tanggal 6 Februari 2026 B06: 1. Laporan identifikasi substansi mekanisme pengawasan dan Laporan hasil uji petik pda Balai Pemasarakatan; 2. Laporan kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan B09: 1. Rancangan Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan, Laporan Uji Petik dan FGD dengan Pemangku kepentingan;

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
	3. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	100%		2. Laporan Penguatan dan Sosialisasi Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan
					B12: Penetapan Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan	B12: Penetapan Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan
					B03: 1. Penerbitan SK Remisi: - Remisi Khusus Hari Raya Imlek - Remisi Khusus Hari Raya Nyepi - Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 2. Penerbitan SK Pengurangan Masa Pidana: - Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Imlek - Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Nyepi - Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Idul Fitri 3. Penerbitan SK Integrasi narapidana dan anak binaan pada TW I	B03: 1. Jumlah Narapidana penerima Remisi Khusus Hari Raya Imlek : 43 orang; 2. Jumlah Narapidana penerima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi: 1.506 orang; 3. Jumlah Narapidana penerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri: 154.785 orang; 4. Jumlah Anak binaan penerima Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Nyepi: 8 orang; 5. Jumlah Anak binaan penerima Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Idul Fitri: 613 orang; 6. Jumlah Anak binaan penerima Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Imlek: 1 orang Data Dukung Jumlah Narapidana Penerima Remisi 2026 : https://drive.google.com/drive/folders/1enfOdXpq9UMW1MeZvXA9O6jDmOXERGei Penebitan SK integrasi : https://drive.google.com/drive/folders/1enfOdXpq9UMW1MeZvXA9O6jDmOXERGei
					B06: 1. Penerbitan SK Remisi Khusus Hari Raya Waisak; 2. Penerbitan SK Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Waisak; 3. Penerbitan SK Integrasi narapidana dan anak binaan pada TW II.	B06
					B09: 1. Penerbitan SK Remisi Umum	B09

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					2. Penerbitan SK Pengurangan Masa Pidana: - Pengurangan Masa Pidana Hari Anak Nasional - Pengurangan Masa Pidana Umum 3. Penerbitan SK Integrasi narapidana dan anak binaan pada TW III	
					B12: 1. Penerbitan SK Remisi Khusus Hari Raya Natal; 2. Penerbitan SK Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Natal; 3. Penerbitan SK Integrasi narapidana dan anak binaan pada TW IV.	B12
	4. Direktorat Pengamanan dan Intelijen	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	1. Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen	100%	B03: Penyusunan Pedoman Koordinasi dan Sinergi Pengamanan Pemasarakatan dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait	B03: https://drive.google.com/file/d/10TwEq8VqNMOvnwG3meqQTfzNt-v5vvff/view?usp=sharing Nota Dinas Usulan Penyusunan Kebijakan Dit.Pamintel 2026 https://drive.google.com/file/d/1GQ6B-ZRfY8xLoT8bxfG46LI0dhCOVI9c/view?usp=sharing
					B06:	B06:
					B09:	B09:
					B12:	B12:
			2. Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban	100%	B03: 1. Laporan Pelaksanaan Penindakan Pengamanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; 2. Laporan Pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; 3. Laporan Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban; 4. Laporan Penyelenggaraan Intelijen Pemasarakatan.	B03: 1. Pemindahan Narapidana Resiko Tinggi Ke Nusakambangan; 2. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban; 3. Data Hasil Penggeledahan Blok Hunian dan Tes Urine; 4. Pengawasan Pengamanan Wartelsuspas.
					B06:	B06:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B09:	B09:
					B12:	B12:
	5. Direktorat Kepatuhan Internal	Terselenggaranya Pencegahan Pengendalian Fasilitasi Advokasi Dan Investigasi Internal	Indeks Integritas Pegawai	80,45	B03: 1. Sosialisasi Standar Penegakan Kepatuhan Internal; 2. Monitoring dan Evaluasi; 3. Penegakan Kepatuhan Internal (Investigasi); 4. Sidang Kode Etik; 5. Pembinaan Mental dan Disiplin.	B03: 1. Laporan Sosialisasi Standar Penegakan Kepatuhan Internal; 2. Laporan Sidang Kode Etik; 3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Disiplin.
					B06: 1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Penegakan Kepatuhan Internal (Investigasi); 3. Sidang Kode Etik; 4. Pembinaan Mental dan Disiplin; 5. Pemantauan Kinerja; 6. Pemantauan Zona Integritas.	B06:
					B09: 1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Penegakan Kepatuhan Internal (Investigasi); 3. Sidang Kode Etik; 4. Pembinaan Mental dan Disiplin; 5. Pemantauan Kinerja; 6. Pemantauan Zona Integritas.	B09:
					B12: 1. Monitoring dan Evaluasi; 2. Penegakan Kepatuhan Internal (Investigasi); 3. Sidang Kode Etik; 4. Pembinaan Mental dan Disiplin; 5. Pemantauan Kinerja; 6. Pemantauan Zona Integritas.	B12:
	6. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	1. Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan	3,36	B03: 1. Rekapitulasi Usulan Rencana Kerja Penyusunan Kebijakan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 2026; 2. Permohonan Penetapan Rencana Kerja Penyusunan Kebijakan 2026;	B03: https://drive.google.com/drive/folders/11HB_Dv16SOxsOSDewsqr-iWqHb0YBkKvP

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					3. Rapat Klarifikasi Usulan Rencana Kerja Penyusunan Kebijakan dengan Direktorat Pemrakarsa; 4. Rapat Verifikasi dan Klarifikasi Rencana Kerja Penyusunan Kebijakan 2026; 5. Pengumpulan Data, Inventarisasi, dan Pemetaan Kebijakan Internal Direktorat Jenderal Pemasarakatan; 6. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Kebijakan Pemasarakatan; 7. Koordinasi dan Penyelarasan dengan Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian; 8. Pengumpulan Data dan Pemetaan Sistem Kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan; 9. Penyusunan Draft Awal Sistem Kerja Ditjenpas dan Mekanisme Pelaksanaan 10. Rapat Teknis Pembahasan Draft Sistem Kerja Ditjenpas; 11. Penyempurnaan Draft Sistem Kerja Ditjenpas; 12. Rapat Pembahasan dan Kesepakatan Substansi Sistem Kerja Ditjenpas; 13. Finalisasi Dokumen Sistem Kerja Ditjenpas; 14. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Sistem Kerja Ditjenpas; 15. Pengumpulan Data dan Pemetaan Sistem Kerja UPT; 16. Penyusunan Draft Awal Sistem Kerja UPT dan Mekanisme Pelaksanaan.	
					B06: 1. Penetapan Rencana Kerja Penyusunan Kebijakan 2026; 2. Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Rencana Kerja 2026; 3. Rapat Evaluasi Hasil Koordinasi Penyusunan Peta Kebijakan Pemasarakatan;	B06

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					4. Penyusunan Peta Kebijakan Masyarakat; 5. Finalisasi Penyusunan Peta Kebijakan Masyarakat; 6. Penyusunan Inventaris Kebijakan Internal; 7. Analisa, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Internal pada Satuan Kerja Masyarakat; 8. Pengumpulan Data, Inventarisasi, Pemetaan Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat; 9. Penyusunan Konsep dan Draft Awal Proses Bisnis Level 2 dan Mekanisme Kerja; 10. Rapat Teknis Pembahasan Draft Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat; 11. Penyempurnaan Draft Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat; 12. Rapat Pembahasan dan Kesepakatan Substansi Proses Bisnis Level 2 dengan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat; 13. Finalisasi dokumen Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat; 14. Penetapan Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat; 15. Sosialisasi Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat dan Tindak Lanjut Penyusunan Level Selanjutnya (Level n) 16. Pengumpulan Data dan Kajian Materi Sosialisasi; 17. Penyusunan Draft Bahan Paparan; 18. Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem dan Mekanisme Kerja.	
					B09: 1. Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Rencana Kerja 2026 Triwulan III; 2. Penetapan Peta Kebijakan Masyarakat;	B09

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					3. Analisa, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Internal pada Satuan Kerja Masyarakat; 4. Penyusunan Laporan Hasil Analisa, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Internal; 5. Sosialisasi Proses Bisnis Level 2 Direktorat Jenderal Masyarakat dan Tindak Lanjut Penyusunan Level Selanjutnya (Level n); 6. Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem dan Mekanisme Kerja	
					B12: 1. Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Rencana Kerja 2026 Triwulan IV; 2. Penyusunan Laporan Hasil Analisa, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Internal; 3. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Kerja Direktorat Jenderal Masyarakat Tahun 2026; 4. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Kerja Direktorat Jenderal Masyarakat Tahun 2026; Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Sistem dan Mekanisme Kerja.	B12
			2. Persentase Keselarasan Renstra dan Renja	90%	B03: 1. Penyusunan Kajian Tunjangan 3T untuk Petugas Masyarakat; 2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Ditjenpas Tahun 2026; 3. Penyusunan Informasi Kinerja Ditjen Masyarakat Tahun 2027; 4. Rapat Sinkronisasi Revisi Infokin Ditjenpas Tahun 2026 via aplikasi SAKTI; 5. Rapat penyusunan <i>Annual Work Plan</i> Ditjenpas untuk Program Pendanaan AIPJ-3 Tahun 2026-2027; 6. Penyusunan Kajian Value for Money KPBU Masyarakat; 7. Rapat Internal tindak lanjut Kajian VfM KPBU Masyarakat;	B03: https://drive.google.com/drive/folders/1d5IBSF3mXSRMtSt2jMLaUegLU4IH_RZM?usp=sharing

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					8. Penyusunan Kajian Implementasi Skema <i>Yellow Ribbon</i> bagi Pemasayarakatan di Indonesia; 9. Penyusunan Kajian <i>Outsourcing</i> sebagai Tenaga Pengamanan Tambahan di Lapas/Rutan; 10. Penyusunan skema Program Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Lapas dan Rutan; 11. Penyusunan Kajian Strategi Pengentasan <i>Overcrowding</i> melalui Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Hunian; 12. Rapat Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Renaksi Ditjenpas untuk Proaksi Kemenimipas Tahun 2026 13. Rapat Strategi Penganggaran Sebagai Pertimbangan Implementasi KUHP dan KUHP Tahun 2026; 14. Rapat Pembahasan Usulan Item/Kegiatan Pemanfaatan PNBP Imigrasi untuk Ditjen Pemasayarakatan; 15. Studi literatur, pengumpulan data, dan pemetaan Satker untuk Rekomendasi Teknis pemanfaatan tenaga surya & bio gas pada Satker Pemasayarakatan (Renaksi-Proaksi Kemenimipas Bidang PAS)	

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B06: 1. Rapat Internal Tindaklanjuti Kajian Implementasi <i>Yellow Ribbon</i> di Indonesia; 2. Penyusunan Rencana Kerja Program Ditjenpas Tahun 2027; 3. Ekspose Internal Tindaklanjuti Kajian VfM KPBU Pemasyarakatan kepada Pimti Ditjenpas; 4. Ekspose Internal Kajian Implementasi Skema <i>Yellow Ribbon</i> bagi Pemasyarakatan di Indonesia; 5. Ekspose Internal Kajian Outsourcing sebagai Tenaga Pengamanan Tambahan di Lapas/Rutan; 6. Penyusunan Rencana GRBB Tahun 2025 Realisasi Tahun 2026; 7. Ekspose Internal Program Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Lapas dan Rutan; 8. Penyusunan dan Pemetaan Program Prioritas untuk Rencana Kerja Ditjenpas Tahun 2027 9. Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2027; 10. Nodin Permohonan kepada Sesditjenpas untuk Monev Tindaklanjuti Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 Triwulan II; 11. Analisa kebutuhan, potensi, dan kelayakan pemanfaatan tenaga surya-bio gas pada Satker Pemasyarakatan (Renaksi-Proaksi Kemenimipis Bidang PAS)	B06
					B09: 1. Penyusunan Rencana GRBB Tahun 2025 Realisasi Tahun 2026; 2. Penyusunan dan Pemetaan Program Prioritas untuk Rencana Kerja Ditjenpas Tahun 2027; 3. Penetapan Tindaklanjuti Kajian Implementasi Skema <i>Yellow Ribbon</i> bagi Pemasyarakatan di Indonesia;	B09

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					4. Penetapan Tindaklanjut Kajian Outsourcing sebagai Tenaga Pengamanan Tambahan di Lapas/Rutan 5. Penetapan Kajian Vfm KPBU Masyarakat; 6. Pengajual Usulan KPBU Masyarakat ke Bappenas untuk masuk pada PPP Book 2027; 7. Nodin Permohonan kepada Sesditjenpas untuk Monev Tindaklanjut Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 Triwulan III; 8. Trilateral Meeting Pagu Anggaran 2027; 9. Penyusunan Laporan Rekomendasi Teknis pemanfaatan tenaga surya dan bio gas pada Satker Masyarakat (Renaksi-Proaksi Kemenimipas Bidang PAS)	
					B12: 1. Penetapan Rencana Kerja (Renja) dan Program Prioritas Ditjenpas Tahun 2027 2. Monitoring Pelaksanaan GRBB 2025 Tahun Realisasi 2026; 3. Nodin Permohonan kepada Sesditjenpas untuk Monev Tindaklanjut Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 Triwulan IV 4. Penyampaian Laporan Rekomendasi Teknis untuk pelaksanaan pengadaan pembelian peralatan solar cell dan bio gas di Satker Masyarakat (Renaksi-Proaksi Kemenimipas Bidang PAS)	B12
			3. Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Masyarakat	9,2%	B03: 1. Koordinasi terkait teknis pelaksanaan lelang MYC dan rekomendasi analisa harga satuan oleh PU; 2. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Satker Masyarakat.	B03: https://drive.google.com/drive/folders/1ScWvazxcR3xPKwXiE6l-oxUrtuAQclCW?usp=sharing
					B06: 1. Penetapan Rencana Induk Pembangunan Satker Masyarakat; 2. Pengkajian ulang internal Ditjenpas untuk pemilihan lokasi pembangunan Mega Prison;	B06

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					3. Study kelayakan/ feasibility study terhadap pulau yang sudah ditentukan sebagai lokasi pembangunan Mega Prison.	
					B09: Supervisi Dan Bimbingan Teknis Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Khusus Masyarakat	B09
					B12: Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Khusus Masyarakat	B12
			4. Indeks Kelembagaan	3,12	B03: 1. Rancangan Perubahan ORTA UPT Masyarakat; 2. Usulan Perubahan Nomenklatur UPT PAS Ke Kemenpan RB; 3. Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat tentang ORTA RS Masyarakat; 4. Rancangan Keputusan Menteri Imigrasi dan Masyarakat tentang Perubahan Nomenklatur dan Tempat Kedudukan pada Lapas, Rutan, dan LPP Tangerang; 5. Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat tentang Pola Klasifikasi UPT Masyarakat; 6. Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat tentang Kantor Masyarakat Nusakambangan; 7. Rancangan Keputusan Menteri Imigrasi dan Masyarakat tentang Pembentukan Bapas.	B03: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sEp7xBsEoiFCIuH4OQOSncJo-9ExfuBO
					B06:	B06:
					B09:	B09:
					B12:	B12:
					B03: 1. Koordinasi Pelayanan Publik; 2. Penyusunan DIP-DIK 2026; 3. Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik 2026;	B03: 1. Laporan Bulanan PPID Januari-Maret 2026 2. <i>Draft</i> awal DIP-DIK 3. <i>Draft</i> awal Pedoman Standar Pelayanan
	7. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat	1. Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang	Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Masyarakat	100%		

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
		Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan			4. Sosialisasi Peran Serta Masyarakat bidang Pemasyarakatan.	Publik 2026 4. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat
					B06: 1. Koordinasi Pelayanan Publik; 2. Penyusunan DIP-DIK 2026; 3. Penyusunan Pedoman; 4. Standar Pelayanan Publik 2026; 5. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik ; 6. Sosialisasi Peran Serta Masyarakat bid. Pemasyarakatan 7. Penyusunan Instrumen Indeks Partisipasi Masyarakat	B06:
					B09: 1. Koordinasi Pelayanan Publik 2. Penyusunan DIP-DIK 2026 3. Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik 2026 4. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 5. Sosialisasi PSM bidang Pemasyarakatan 6. Bimbingan Teknis Duta Kerja Sama 7. Supervisi Kerja Sama PAS 8. Monev Kerja Sama PAS 9. Penyusunan Instrumen Indeks Partisipasi Masyarakat	B09:
					B12: 1. Koordinasi Pelayanan Publik 2. Penyusunan DIP-DIK 2026 3. Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik 2026 4. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 5. Sosialisasi PSM bidang Pemasyarakatan 6. Bimbingan Teknis Duta Kerja Sama 7. Supervisi Kerja Sama Pemasyarakatan 8. Monev Kerja Sama Pemasyarakatan 9. Rapat Koordinasi Sahabat Pemasyarakatan	B12:
		2. Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan	1. Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time)	92%	B03: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI;	B03: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI; 2. TOR Pengusulan anggaran untuk

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
		yang Berdampak			2. Pengusulan anggaran untuk Pengadaan Sewa <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) sebagai pusat pemulihan system 3. Perpanjangan Lisensi Pendukung TI	Pengadaan Sewa Disaster Recovery Center (DRC) sebagai pusat pemulihan system; 3. TOR Perpanjangan Lisensi Pendukung TI
					B06: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI 2. Implementasi Sewa DRC dan Perpanjangan Lisensi Pendukung TI	B06: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI; 2. Laporan Implementasi Sewa DRC dan Perpanjangan Lisensi Pendukung TI.
					B09: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI 2. Implementasi Sewa DRC dan Perpanjangan Lisensi Pendukung TI	B09: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI; 2. Laporan Implementasi Sewa DRC dan Perpanjangan Lisensi Pendukung TI.
					B12: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI 2. Implementasi Sewa DRC dan Perpanjangan Lisensi Pendukung TI	B12: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI; 2. Laporan Implementasi Sewa DRC dan Perpanjangan Lisensi Pendukung TI
			2. Tingkat Pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Layanan Tik Ditjen Pemasyarakatan	77%	B03: 1. Melakukan Asesmen Kebutuhan Layanan TI 2. Melakukan Perancangan Layanan TI 3. Melakukan Pengembangan Layanan TI 4. Melakukan Uji Fungsi Layanan TI	B03: Laporan Perancangan dan Pengembangan fitur administrasi Tahanan di Rumah Tahanan Negara secara lengkap dan <i>real time</i> , meliputi antara lain: a. Perhitungan <i>Overstaying</i> b. masa Penahanan
					B06: 1. Melakukan Asesmen Kebutuhan Layanan TI 2. Melakukan Perancangan Layanan TI 3. Melakukan Pengembangan Layanan TI 4. Melakukan Uji Fungsi Layanan TI	B06: Laporan Perancangan dan Pengembangan Fitur Mekanisme Perubahan Pidana Mati dan Seumur Hidup di SDP, seperti: a. Putusan b. Masa Pidana c. Status Perubahan Pidana
					B09: 1. Melakukan Asesmen Kebutuhan Layanan TI 2. Melakukan Perancangan Layanan TI 3. Melakukan Pengembangan Layanan TI 4. Melakukan Uji Fungsi Layanan TI	B09: Laporan Perancangan dan Pengembangan Fitur SDP yang memuat: a. klasifikasi pidana lama - baru b. kalkulator penyesuaian pidana baru c. klasifikasi penyesuaian status hukum -

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						naik - tetap - turun - bebas - pengakhiran bimbingan d. status proses penyesuaian status hukum
					B12: 1. Melakukan Asesmen Kebutuhan Layanan TI 2. Melakukan Perancangan Layanan TI 3. Melakukan Pengembangan Layanan TI 4. Melakukan Uji Fungsi Layanan TI	B12: Laporan Perancangan dan Pengembangan Aplikasi SDP Bapas sesuai dengan KUHP
			3. Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Masyarakat	2,8	B03: 1. Inventarisasi kebutuhan data masyarakat 2. Penyusunan jadwal pemutakhiran data 3. Penetapan SK Tim Pertukaran Data 4. Penetapan Tim Satu Data Masyarakat Ditjenpas	B03: 1. Rekapitulasi kebutuhan data dan jadwal pemutakhiran data 2. SK TIM Pertukaran data 3. SK TIM Satu Data --> link daduk : https://drive.google.com/drive/folders/1n3bzyrZQ-1hwqP901i2rt0R0K-njpkhV?usp=sharing
					B06: 1. Pengumpulan dan Pengolahan data 2. Verifikasi data 3. Pemutakhiran data	B06: 1. Rekapitulasi Pengumpulan dan pengolahan data; 2. Rekapitulasi verifikasi data; 3. Rekapitulasi ketersediaan data.
					B09: 1. Pengumpulan dan Pengolahan data 2. Verifikasi data 3. Pemutakhiran data	B09: 1. Rekapitulasi Pengumpulan dan pengolahan data; 2. Rekapitulasi verifikasi data; 3. Rekapitulasi ketersediaan data.
					B12: 1. Pengumpulan dan Pengolahan data 2. Verifikasi data 3. Pemutakhiran data	B12: 1. Rekapitulasi Pengumpulan dan pengolahan data 2. Rekapitulasi verifikasi data 3. Rekapitulasi ketersediaan data
			4. Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Masyarakat	3,08	B03: 1. Pemenuhan data sesuai permintaan triwulan I 2. Penyajian data harian triwulan I 3. Pelaksanaan Pertukaran data triwulan I	B03: - Rekapitulasi permintaan data tw I - Laporan pelaksanaan pertukaran data tw I ----> link daduk : https://drive.google.com/drive/folders/1_UPoVEyF1RL95r3Z7F4xnc6Mfly5oAlc?usp=s

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						haring
					B06: 1. Pemenuhan data sesuai permintaan triwulan II 2. Penyajian data harian triwulan II 3. Pelaksanaan Pertukaran data triwulan II	B06: 1. Rekapitulasi permintaan data tw II 2. Rekapitulasi penyajian data harian tw II 3. Laporan pelaksanaan pertukaran data tw II
					B09: 1. Pemenuhan data sesuai permintaan triwulan III 2. Penyajian data harian triwulan III 3. Pelaksanaan Pertukaran data triwulan III	B09: 1. Rekapitulasi permintaan data tw III 2. Rekapitulasi penyajian data harian tw III 3. Laporan pelaksanaan pertukaran data tw III
					B12: 1. Pemenuhan data sesuai permintaan triwulan IV 2. Penyajian data harian triwulan IV 3. Pelaksanaan Pertukaran data triwulan IV	B12: 1. Rekapitulasi permintaan data tw IV 2. Rekapitulasi penyajian data harian tw IV 3. Laporan pelaksanaan pertukaran data tw IV
	5. Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang Berdampak	Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakat	69%		B03: 1. Melakukan analisis kebutuhan kerja sama dan hubungan antarlembaga dalam/luar negeri 2. Melakukan penjajakan kerja sama dengan mitra dalam/luar negeri 3. Menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama dalam/luar negeri	B03: 1. Laporan analisis kebutuhan kerja sama 2. Laporan penjajakan kerja sama 3. Dokumen Perjanjian Kerja Sama
					B06: 1. Melakukan penjajakan kerja sama dengan mitra dalam/luar negeri 2. Menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama dalam/luar negeri 3. Pengembangan direktori kerja sama 4. Melakukan pemantauan kerja sama dan hubungan antarlembaga	B06: 1. Laporan penjajakan kerja sama 2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama 3. Laporan pemantauan kerja sama melalui aplikasi SIKAP
					B09: 1. Melakukan penjajakan kerja sama dengan mitra dalam/luar negeri; 2. Menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama dalam/luar negeri; 3. Melakukan supervisi pelaksanaan kerja sama; 4. Melakukan pemantauan kerja sama dan hubungan antarlembaga	B09: 1. Laporan penjajakan kerja sama; 2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama 3. Laporan supervisi kerja sama 4. Laporan pemantauan kerja sama melalui aplikasi SIKAP

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					B12: 1. Melakukan peninjauan kerja sama dengan mitra dalam/luar negeri; 2. Menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama dalam/luar negeri; 3. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dan hubungan antarlembaga	B12: 1. Laporan peninjauan kerja sama; 2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama; 3. Laporan evaluasi kerja sama.
		6. Meningkatnya Kualitas Informasi Dan Dukungan Publik Terhadap Pemasarakatan yang berdampak	1. Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasarakatan	2,36	B06: 1. Pemerataan distribusi konten per bulan; 2. Aktif membalas komentar untuk membangun kedekatan; 3. Penguatan monitoring media.	B06: 1. Laporan distribusi konten per bulan yang menunjukkan pemerataan frekuensi publikasi pada setiap periode sebagai bentuk konsistensi pengelolaan komunikasi publik; 2. Laporan dalam bentuk tangkapan layar interaksi dan respons terhadap komentar/pesan pada media sosial sebagai upaya membangun kedekatan dengan publik; 3. Laporan hasil monitoring media secara berkala terhadap pemberitaan yang berkembang sebagai bentuk penguatan pengendalian isu komunikasi publik
					B09: 1. Penguatan integrasi konten dengan isu strategis; 2. Peningkatan kualitas interaksi melalui komunikasi dua arah yang responsif dan adaptif; 3. Peningkatan kecepatan penyampaian klarifikasi melalui penguatan alur koordinasi antara UPT dan pusat.	B09: 1. Laporan pelaksanaan konten yang terintegrasi dengan isu strategis, disertai dokumentasi publikasi sebagai bentuk penyelarasan komunikasi publik dengan agenda prioritas; 2. Laporan dalam bentuk tangkapan layar interaksi dua arah pada media sosial yang menunjukkan respons aktif terhadap komentar dan pesan dari publik; 3. Laporan penanganan dan klarifikasi pemberitaan negatif yang memuat waktu respons dan alur koordinasi antara UPT dan pusat sebagai bentuk peningkatan responsivitas penanganan isu.
					B12:	B12:

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
			2. Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasyarakatan	2,00	1. Evaluasi dan Penyusunan guideline/strategi konten tahun berikutnya; 2. Evaluasi efektivitas strategi keterlibatan berdasarkan data performa; 3. Evaluasi ketepatan waktu dan efektivitas respons klarifikasi terhadap isu yang berkembang.	1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan konten serta dokumen strategi konten untuk tahun berikutnya sebagai arah pengelolaan komunikasi publik; 2. Laporan analisis performa media sosial yang memuat data keterlibatan/interaksi (rasio interaksi) sebagai dasar evaluasi efektivitas strategi komunikasi; 3. Laporan evaluasi penanganan pemberitaan negatif yang memuat ketepatan waktu respons dan efektivitas klarifikasi sebagai bentuk penguatan pengendalian isu.
					B03: 1. Membentuk Tim Duta Layanan; 2. Pemasyarakatan dari Eselon II; 3. Memberikan penguatan kepada Duta Layanan Pemasyarakatan; 4. Memberikan Layanan Informasi; 5. Memberikan Layanan Perizinan. 5. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	B03: 1. Laporan kegiatan Penguatan Pelayanan Publik 2. Laporan Triwulan PPID 3. Hasil survey SKM dan SPAK
					B06: 1. Memberikan penguatan terhadap Duta Layanan Pemasyarakatan; 2. Memberikan Layanan Informasi; 3. Memberikan Layanan Perizinan; 4. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	B06: 1. Laporan kegiatan Penguatan Pelayanan Publik; 2. Laporan Triwulan PPID; 3. Hasil survey SKM dan SPAK.
					B09: 1. Memberikan penguatan terhadap Duta Layanan Pemasyarakatan; 2. Memberikan Layanan Informasi; 3. Memberikan Layanan Perizinan 4. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	B09: 1. Laporan kegiatan Penguatan Pelayanan Publik; 2. Laporan Triwulan PPID; 3. Hasil survey SKM dan SPAK
					B12: 1. Memberikan penguatan terhadap Duta Layanan Pemasyarakatan; 2. Memberikan Layanan Informasi; 3. Memberikan Layanan Perizinan; 4. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	B12: 1. Laporan kegiatan Penguatan Pelayanan Publik ; 2. Laporan Triwulan PPID; 3. Hasil survey SKM dan SPAK; 4. Laporan PEKPPP

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					5. Melakukan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik	
	8. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas	100%	B03: 1. Rapat penyusunan Standar Perawatan Paliatif bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan; 2. Rapat Penyusunan Standar Pencegahan dan Pengendalian Skabies dan Penyakit Menular lainnya 3. Penyampaian SK Direktur Jenderal pemsarakatan tentang Pelaksanaan RAN Pengendalian Penyakit Menular TBC, HIV dan Hepatitis Tahun 2025-2029 kepada kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan; 4. Rapat penyusunan draft awal standart Rehabilitasi; 5. Rapat persiapan dalam rangka kegiatan sosialisasi kebijakan standar layanan kesehatan jiwa; 6. sosialisasi kebijakan keputusan direktur jenderal pemsarakatan tentang standar layanan kesehatan jiwa Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan	B03: Data dukung
	9. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Persentase Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak	100%	B06: B09: B12: B03: 1. Rapat penyusunan draft awal petunjuk teknis pelayanan tahanan; 2. Kegiatan virtual meeting pengarahan/pembahasan langkah-langkah strategis pada masa transisi perubahan hukum pidana dengan berlakunya KUHP 2023 dan KUHP 2025 bidang Pelayanan Tahanan; 3. Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data fasilitasi bantuan hukum yang meliputi pelaksanaan penyuluhan hukum, pelaksanaan fasilitasi dan bantuan hukum	B06: B09: B12: B03: 1. Undangan rapat 2. Pelaksanaan virtual meeting dengan seluruh Lapas/Rutan 3. Jumlah fasilitasi bantuan hukum di Lapas/Rutan : 4. Jumlah kerjasama LBH dengan Lapas/Rutan : Data Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1xdeZjRO50bo7Y51T81kiBBz8AMbXEaIK?usp=sharing

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
					litigasi, pelaksanaan koordinasi dengan organisasi bantuan hukum dan advokat	
					B06:	B06:
					B09:	B09:
					B12:	B12:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarkatan (BPSDM IMIPAS)	1. Sekretariat BPSDM IMIPAS	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM	100 %	B03: 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi; 2. Pemenuhan Data Dukung RAT RB 20263. Penyusunan Dokumen MR 2026.	B03: 1. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi; 2. Dokumen Data Dukung RAT RB 20263. Dokumen MR 2026.
					B06: Pemenuhan Data Dukung RAT RB 2026	B06: 1. Dokumen Data Dukung RAT RB 2026 2. Laporan Penerapan MR 2026
					B09: Pemenuhan Data Dukung RAT RB 2026	B09: 1. Dokumen Data Dukung RAT RB 2026 2. Laporan Penerapan MR 2026
					B12: 1. Pemenuhan Data Dukung RAT RB 2026 2. Pemenuhan Data Dukung SPIP 2026 3. Penerapan Dokumen MR 2026 4. Pemenuhan Data Dukung SAKIP 2026	B12: 1. Dokumen Data Dukung RAT RB 2026 2. Dokumen Data Dukung SPIP 2026 3. Laporan Penerapan MR 2026 4. Dokumen Data Dukung SAKIP 2026
			2. Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BPSDM terhadap Layanan Kesekretariatan	3,00	B03: 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran 3. Usulan Anggaran Belanja Tambahan satker BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia 4. Penyusunan Rencana Kerja Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan	B03: 1. Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Surat Usulan Anggaran Belanja Tambahan satker BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia 4. Surat Usulan Rencana Kerja Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan
					B06: 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran 3. Penyesuaian Alokasi Anggaran Tahun 2027 4. Penjajakan dan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama	B06: 1. Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Dokumen Penyesuaian Alokasi Anggaran Tahun 2027 4. Dokumen terkait Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
	3. Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi dan Kepala Pusat Pelatihan	Terselenggaranya Pengembangan dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai kebutuhan kompetensi jabatan	1. Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti untuk pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan	87,50	B09: 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran 3. Penyesuaian Alokasi Anggaran Tahun 2027	B09: 1. Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Dokumen Penyesuaian Alokasi Anggaran Tahun 2027
					B12: 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	B12: 1. Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Laporan Realisasi Anggaran
					B03: 1. Review Modul KUHP Baru untuk Penyusunan Program MOOC KUHP Baru 2. Inventarisasi Kebutuhan Materi untuk Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasarakatan dalam Rangka Implementasi KUHP dan KUHP Baru 3. Penyusunan SOP Pengembangan dan Penilaian Kompetensi 4. UKOM MACT-PAKET IV PDJL Ditjen PAS 5. Seleksi Calon Peserta PKN Tk.I	B03: 1. Laporan Kegiatan Review Modul KUHP Baru untuk Penyusunan Program MOOC KUHP Baru 2. Laporan Kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Materi untuk Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasarakatan dalam Rangka Implementasi KUHP dan KUHP Baru 3. Laporan Kegiatan Penyusunan SOP Pengembangan dan Penilaian Kompetensi 4. Laporan Kegiatan UKOM MACT-PAKET IV PDJL Ditjen PAS 5. Laporan Kegiatan Seleksi Calon Peserta PKN Tk.I
					B06: 1. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjen PAS 2. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial 3. UKOM JF Ahli Utama 4. UKOM Pengisian Jabatan Pimti Pratama 5. Perencanaan Penyelenggaraan Diklat Calon Assessor di BPSDM IMIPAS 6. Pembuatan video pembelajaran MOOC KUHP Baru 7. Penyusunan <i>Grand Design Assessment Center</i> 8. Inventarisasi Kebutuhan Materi untuk Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi ASN IMIPAS	B06: 1. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjen PAS 2. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial 3. Laporan Kegiatan UKOM JF Ahli Utama 4. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Pimti Pratama 5. Laporan Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Diklat Calon Assessor di BPSDM IMIPAS 6. Video pembelajaran MOOC KUHP Baru 7. Laporan Kegiatan Penyusunan Grand

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
						Design Assessment Center 8. Materi untuk Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi ASN IMIPAS
					B09: 1. UKOM JF Ahli Utama 2. UKOM JF Ahli Utama 3. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjen PAS 4. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjenim 5. Penyelenggaraan Diklat Calon Assessor di BPSDM IMIPAS 6. Penyusunan Pedoman dan SOP Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 7. Pembuatan Video Pembelajaran <i>E-learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi ASN IMIPAS 8. Penyusunan Instrumen Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Level 3	B09: 1. Laporan Kegiatan UKOM JF Ahli Utama 2. Laporan Kegiatan UKOM JF Ahli Utama 3. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjen PAS 4. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjenim 5. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Calon Assessor di BPSDM IMIPAS 6. Pedoman dan SOP Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 7. Video Pembelajaran <i>E-learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi ASN IMIPAS 8. Laporan Kegiatan Penyusunan Instrumen Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Level 3
					B12: 1. UKOM PDJL dan Kenaikan Jenjang Analisis SDMA 2. UKOM PDJL dan Kenaikan Jenjang Arsiparis 3. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial di Kemen IMIPAS 4. UKOM JF Ahli Madya 5. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjen PAS 6. UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjenim 7. Penyusunan dan Penyediaan <i>Tools Assessment Center</i>	B12: 1. Laporan Kegiatan UKOM PDJL dan Kenaikan Jenjang Analisis SDMA 2. Laporan Kegiatan UKOM PDJL dan Kenaikan Jenjang Arsiparis 3. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial di Kemen IMIPAS 4. Laporan Kegiatan UKOM JF Ahli Madya 5. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjen PAS 6. Laporan Kegiatan UKOM Pengisian Jabatan Manajerial pada Ditjenim 7. Laporan Kegiatan Penyusunan dan Penyediaan <i>Tools Assessment Center</i>
			2. Persentase Alumni Peserta Pengembangan	87,50	B03: 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.I 2. SESPIMTI	B03: 1. Laporan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.I

Unit Utama	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Uraian Rencana Aksi	Data Dukung Rencana Aksi
			Kompetensi yang meningkat Kompetensinya		3. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II 4. Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2. Laporan Kegiatan SESPIMTI 3. Laporan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II 4. Laporan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
					B06: 1. Pelatihan Kepemimpinan PengawasPelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. Pelatihan Intelijen Dasar	B06: 1. Laporan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2. Laporan Kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Laporan Kegiatan Pelatihan Manajemen Risiko 4. Laporan Kegiatan Pelatihan Intelijen Dasar
					B09: 1. Pendidikan Khusus Keimigrasian (Politeknik) 2. Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (Politeknik) 3. Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1 4. Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (PDJL)	B09: 1. Laporan Kegiatan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Politeknik) 2. Laporan Kegiatan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (Politeknik) 3. Laporan Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1 4. Laporan Kegiatan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (PDJL)
					B12: 1. Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda (PDJL) 2. Sosialisasi PBJ Pemerintah bagi KPA yang menjalankan tugas PPK 3. Pelatihan Auditor Ahli Pertama 4. Pelatihan Investigasi 5. Pelatihan Dasar CPNS bagi Alumni Politeknik	B12: 1. Laporan Kegiatan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda (PDJL) 2. Laporan Kegiatan Sosialisasi PBJ Pemerintah bagi KPA yang menjalankan tugas PPK 3. Laporan Kegiatan Pelatihan Auditor Ahli Pertama 4. Laporan Kegiatan Pelatihan Investigasi 5. Laporan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS bagi Alumni Politeknik

a.n. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIS JENDERAL;



ASEP KURNIA